



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yakni Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Adapun tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran guna perbaikan di tahun mendatang sangat dibutuhkan. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Subang, 28 Maret 2024

Pj. BUPATI SUBANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Tahun 2023 ini memuat pencapaian sasaran strategis di tahun terakhir berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator-indikator sasaran dari 15 (lima belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga terlihat capaiannya sebagai berikut.

- A. 13 (tiga belas) capaian sasaran strategis dengan kriteria penilaian sangat tinggi, yaitu:
 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
 2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Jembatan, dan Sarana Perhubungan yang berkualitas;
 3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
 4. Meningkatnya Pemerataan Pembanguna dan Pemberdayaan Desa;
 5. Meningkatnya Derajat Pendidikan;

6. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
 7. Meningkatnya Peran Industri Kreatif dan Perdagangan Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi;
 8. Meningkatnya Investasi;
 9. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Meningkatnya Pariwisata yang Berdaya Saing;
 11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
 12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; dan
 13. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.
- B. 1 (satu) capaian sasaran strategis dengan kriteria penilaian tinggi, yaitu sasaran Meningkatnya Pertanian yang Mandiri Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan.
- C. 1 (satu) sasaran strategis masih dalam proses dikarenakan terdapat indikator dari sasaran strategis tersebut yang masih dalam tahap penilaian yaitu sasaran Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Hal ini tentu merupakan kerja keras dan kerja sama semua elemen aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersama stakeholder dan masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Subang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Subang 2018 - 2023.....	17
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	23
2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	31
3.2 Akuntabilitas Keuangan	97
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Subang Tahun 2022 – 2023	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Subang Tahun Desember 2022 - 2023	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Subang 2022 - 2023	11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022 - 2023	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Subang 2018 - 2023	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023	28
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten SUBangTahun 2023	29
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	33
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Subang Tahun 2023.....	34
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Subang 2023	32
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Subang Tahun2019 - 2023	34
Tabel 3.4	Rincian Hasil Nilai RB Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2021 – Tahun 2023	38
Tabel 3.5	Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2022 - 2023	43
Tabel 3.6	Kondisi Jembatan Kabupaten di Kabupaten Subang Tahun 2023.....	54
Tabel 3.7	Analisi Pencapaian Sasaaran Program Peningkatan Kualitas.....	59
Tabel 3.8	Luas Lahan Sawah Terdampak Banjir dan El Nino Kabupaten Subang Tahun 2023	71
Tabel 3.9	Perhitungan IKA Kabupaten Subang Tahun 2023 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021	89
Tabel 3.10	Rincian Program dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023.....	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Indeks Pembangunan Manusia	6
Grafik 1.2	PDRB Kabupaten Subang Tahun 2023.....	7
Grafik 1.3	Jumlah dan Persentase PNSD Berdasarkan Kelompok Usia di Subang Subang Tahun 2023.....	11
Grafik 1.4	Jumlah dan Persentase PNSD Berdasarkan Pendidikan Formal Di Kabupaten Subang Tahun 2023	12
Grafik 3.1	Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023	33
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	38
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 – 2023.....	41
Grafik 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023	41
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 - 2023.....	45
Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Opini BPK Tahun 2023.....	46
Grafik 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2019 - 2023.....	47
Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....	48
Grafik 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 - 2023	49
Grafik 3.10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2023	50
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023	52
Grafik 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2023	53
Grafik 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023	54
Grafik 3.14	Perkembangan Capaian Kinerja Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 - 2023.....	55
Grafik 3.15	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ruas Jalan Yang Dielngkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan Tahun 2023	57
Grafik 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2023.....	58
Grafik 3.17	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019 - 2023.....	60
Grafik 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Tahun 2023	61
Grafik 3.19	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2023	62
Grafik 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja HLS dan RRLS Tahun 2023	64
Grafik 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator HLS dan RRLS Tahun 2019 - 2023.....	66
Grafik 3.22	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023	67
Grafik 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 - 2023.....	69
Grafik 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produksi	

	Padi Tahun 2023	70
Grafik 3.25	Perbandingan Capaian Jumlah Produksi Padi Tahun 2019 - 2023	72
Grafik 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2023.....	74
Grafik 3.27	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2019 - 2023.....	75
Grafik 3.28	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Investasi PMDN Tahun 2023....	76
Grafik 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi PMDN Tahun 2019-2023	77
Grafik 3.30	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Investasi PMA Tahun 2023	78
Grafik 3.31	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Investasi PMATahun 2019-2023	79
Grafik 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023	80
Grafik 3.33	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2023	82
Grafik 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2023	83
Grafik 3.35	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019 - 2023	84
Grafik 3.36	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023	86
Grafik 3.37	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2019 - 2023	87
Grafik 3.38	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	88
Grafik 3.39	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator IKLH Tahun 2019 - 2023	94
Grafik 3.40	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2023.....	95
Grafik 3.41	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2019 - 2023.....	96
Grafik 4.1	Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Subang.....	2
Gambar 2.1	Konsep Pembangunan Subang.....	23
Gambar 2.2	Peta Proses Bisnis Kabupaten Subang.....	26
Gambar 3.1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	40
Gambar 3.2	Rata – Rata Indeks Reformasi Birokrasi	41
Gambar 3.3	Kaji Banding terkait SAKIP ke Pemprov DIY	44
Gambar 3.4	Survey Kondisi dan Perbaikan Jalan	51
Gambar 3.5	Jembatan Sebelum Perbaikan dan Sesudah Perbaikan	53
Gambar 3.6	Jalan Yang Dilengkapi Dengan Kelengkapan Penerangan Jalan Umum.....	56
Gambar 3.7	Program Rumah Layak Huni	59
Gambar 3.8	Kegiatan Sosialisasi Dan Verifikasi Pelaporan IDM	62
Gambar 3.9	Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan	65
Gambar 3.10	Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	68
Gambar 3.11	Penanaman Padi Program Tanam Perdana	72
Gambar 3.12	Pemasaran Produk-Produk UMKM.....	74
Gambar 3.13	Pemberian Bantuan Kepada Penduduk Miskin	81
Gambar 3.14	Meningkatnya Wisatawan Pariwisata di Kabupaten Subang Tahun 2023	84
Gambar 3.15	Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	86
Gambar 3.16	Pengawasan Kualitas Air.....	90
Gambar 3.17	Pemantauan Kualitas Udara.....	92
Gambar 3.18	Pemanfaatan Kualitas Lahan.....	93
Gambar 3.19	Penanganan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Subang Tahun 2023	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat (terdapat 27 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten). Luas wilayah Kabupaten Subang 6,34 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Subang merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai utara pulau jawa dan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Bandung. Jarak Kabupaten Subang ke Jakarta adalah 130 Km dan jarak Kabupaten Subang ke Kota Bandung adalah 56 Km. Kabupaten Subang dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya. Aksesibilitas Kabupaten Subang semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur tol cipali dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya interchange jalan tol.

Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa dataran, sedangkan bagian Utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten Subang berupa Perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat, hutan dan lokasi Pariwisata. Pada bagian tengah wilayah kabupaten Subang berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian dan pabrik-pabrik dibidang Industrir. Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten Subang berupa sawah berpengairan teknis dan tambak serta pantai.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kabupaten Subang dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km² atau sekitar 6,34 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1500 m dpl. Dari sisi administratif, wilayah Kabupaten Subang terdiri atas 30

kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan, adapun pusat pemerintahan berada di Kecamatan Subang.

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi tiga bagian, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa.

Kabupaten Subang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 31' - 54' Bujur Timur dan 11' - 49' Lintang Selatan. Adapun batas- batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat.
- Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta dan Karawang.
- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Kabupaten Subang



Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Subang secara administratif terdiri atas 30 kecamatan, 245 desa dan 8 kelurahan.

1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Secara umum pengembangan wilayah di Kabupaten Subang terbagi atas 3 kawasan, yaitu :

1. Kawasan yang ditahan pertumbuhannya karena berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan ini berada di daerah pegunungan di sebelah selatan yang secara umum difungsikan sebagai kawasan konservasi.
2. Kawasan yang didorong pertumbuhannya sebagai daerah investasi, permukiman perkotaan dan industri. Kawasan ini berada di bagian tengah Kabupaten Subang.
3. Kawasan yang ditahan pertumbuhannya karena berfungsi sebagai kawasan ketahanan pangan. Kawasan ini berada di wilayah utara yang merupakan kawasan produktif sektor pertanian pangan.

Selanjutnya ditetapkan pula kawasan strategis yang didasarkan pada:

1. Kawasan Strategis Berdasarkan Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi meliputi:
 - KSK Minapolitan, mencakup wilayah Kecamatan Blanakan, Pagaden, Cijambe, Pagaden Barat, Pabuaran, Pamanukan, dan Kecamatan Patokbeusi
 - KSK Agropolitan Ponggang, mencakup Kecamatan Serangpanjang
 - KSK Kawasan Peruntukan Industri mencakup wilayah koridor jalan tol
 - KSK Pemandian Air Panas mencakup Kecamatan Ciater
 - KSK perkotaan Subang dan sekitarnya mencakup Perkotaan Subang, Kalijati, Pagaden dan Cibogo
2. Kawasan Strategis Berdasarkan Sudut Pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan, meliputi :
 - KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan sungai Cipunagara
 - KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan sungai Ciasem
 - KSK Kawasan hulu
 - KSK Kawasan Tangkapan Sungai Cilamaya

1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Subang adalah kawasan rawan banjir, kawasan banjir rob, dan kawasan rawan abrasi seperti uraian berikut :

1. Kawasan Rawan Banjir

- a) Di Kabupaten Subang terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul.
- b) Banjir di Kabupaten Subang sebagian besar disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengalir sungai-sungai yang ada di Kabupaten Subang serta letak kawasan tertentu pada posisi cekungan.
- c) Kawasan rawan banjir di Kabupaten Subang diperkirakan seluas kurang lebih 1.035 ha, meliputi:
 - Kawasan Rawan Banjir Rob
Kawasan rawan banjir rob yang ada di Kabupaten Subang berada pada daerah bagian utara tepatnya di Kecamatan Legonkulon.
 - Kawasan Rawan Abrasi
Untuk kawasan abrasi pantai yang berada di Kabupaten Subang, terdapat pada sebagian daerah pesisir pantai utara yaitu di Kecamatan Legonkulon dan Kecamatan Pusakanagara.

2. Kawasan Rawan Bencana Geologi

- a) Kawasan rawan gempa
Kawasan rawan gempa yang ada di Kabupaten Subang diperkirakan seluas 6.716 (enam ribu tujuh ratus enam belas) ha dengan daerah yang berpotensi bencana terdapat di daerah bagian selatan yaitu Kecamatan Tanjungsiang, tepatnya di Desa Cimeuhmal; Desa Cikawung; Desa Tanjungsiang; Desa Sirap; Desa Buniara; dan Desa Sindanglaya.
- b) Kawasan rawan letusan gunung berapi
Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi yang berada di Kabupaten Subang, terdapat pada daerah bagian selatan yang memiliki kawasan gunung berapi daerah berbahaya dan daerah

terlarang dengan luas areal kawasan sebesar 15.336 ha dengan sebaran potensi rawan letusan gunung berapi pada daerah Kecamatan Serangpanjang di Desa Cipancar, Kecamatan Sagalaherang di Desa Cicadas, Desa Curug Agung, Desa Sukamandi, Desa Leles dan Desa Sagalaherang, Kecamatan Ciater di Desa Cibeusi dan Desa Cibitung, Kecamatan Jalancagak di Desa Curugrendeng, Desa Sarireja, Desa Bunihayu, Desa Jalancagak, dan Desa Tambakan.

c) Kawasan rawan gerakan tanah

Untuk kawasan rawan gerakan tanah yang berada di Kabupaten Subang, terdapat pada daerah bagian selatan karena berada pada daerah pegunungan. Luasan areal kawasan rawan gerakan tanah ini diperkirakan sebesar 9.619 ha dengan sebaran pada Kecamatan Tanjungsiang di Desa Gandasoli, Desa Rancamanggung, Desa Cibuluh, Desa Pakuhaji, dan Desa Sindanglaya, Kecamatan Cisolak di Desa Sukakerti, Kecamatan Cijambe di Desa Sukahurip, Desa Bantarsari, Desa Cirangkong, Desa Cikadu, Desa Cimenteng, Desa Gunung Tua, dan Desa Cijambe, Kecamatan Ciater di Desa Palasari, Desa Ciater, Desa Nagrak, Desa Cibitung dan Desa Sanca, Kecamatan Kasomalang di Desa Kasomalang Wetan, Desa Pasangrahan, Desa Bojongloa, Desa Panembong, Desa Tenjolaya dan Desa Cimanglid, Kecamatan Jalancagak di Desa Bunihayu, Desa Tambakmekar dan Desa Kumpay dan Kecamatan Subang meliputi Kelurahan Parung, Kelurahan Pasirkareumbi dan Kelurahan Dangdeur.

1.1.4 Demografi

Jumlah Penduduk merupakan salah satu modal pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat namun demikian jika penambahan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan tersebut. Berdasarkan data pada Subang Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Subang tahun 2023 berjumlah 1.649.821 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 826.509 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 823.312 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Subang 2022 - 2023

Uraian	2022	2023
Jumlah Penduduk	1.624.386	1.649.821
Laki-Laki	814.170	826.509
Perempuan	810.216	823.312
Sex Ratio	100,56	100,39
Kepadatan Per Km ²	750	762

Sumber : Subang Dalam Angka 2024

Dilihat dari perbandingan jenis kelamin, pada tahun 2023 penduduk laki-laki di Kabupaten Subang masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan, terlihat dari sex ratio 100,39 persen. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk, pada tahun 2023 di Kabupaten Subang mencapai 762 jiwa per Km² dan mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang mencapai 750 jiwa per Km².

1.1.5 Pembangunan Manusia

Kualitas Pembangunan sebuah wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah grafik Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Subang Tahun 2019-2023.

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : Subang Dalam Angka 2024

1.1.6 Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi residen atau non residen.

Berikut Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Subang.

Grafik 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2023



Sumber :Subang Dalam Angka 2024

1.1.7 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Subang

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memiliki sumber daya manusia yang berkecukupan dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2023 sebanyak 9.282 orang, yang terdiri dari Laki-laki 5.376 orang dan perempuan 6.395 orang yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Subang.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/ Instansi Pemerintah dan
Jenis kelamin di Kabupaten Subang, Desember 2022 – 2023

Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies		2022			2023		
		Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total	Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Sekretariat Daerah	134	91	225	124	82	210
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34	10	44	32	12	44
3	Inspektorat Daerah	58	30	88	57	30	87
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17	20	37	15	21	36
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	31	69	34	29	63
6	Dinas Kesehatan	360	1.026	1.386	347	993	1.340
7	Dinas Ketahanan Pangan	18	21	39	18	20	38
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	36	17	53	33	18	51
9	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	69	44	113	71	41	112
10	Dinas Lingkungan Hidup	119	37	156	107	37	144
11	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	29	14	43	27	13	40
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	182	55	237	174	54	228
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24	12	36	23	11	34
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34	16	50	32	15	47
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.797	4.131	6.928	1.956	2.696	4.652
16	DPPKBP3A	30	34	64	29	34	63
17	Dinas Perhubungan	61	9	70	59	7	66



Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies		2022			2023		
		Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total	Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total
18	Dinas Perikanan	37	14	51	35	14	49
19	Dinas Pertanian	151	90	241	129	83	212
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36	15	51	35	15	50
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	51	23	74	49	22	71
22	Dinas Sosial	26	19	45	23	18	41
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58	24	82	51	24	75
24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	106	11	117	100	11	111
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	30	29	59	29	29	58
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40	31	71	38	32	70
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	38	23	61	32	23	55
28	Badan Pendapatan Daerah	58	34	92	566	36	92
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	10	41	29	10	39
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	11	30	18	9	27
31	Rumah Sakit Umum Daerah Subang	212	329	541	202	320	522
32	Kecamatan Binong	13	4	17	14	5	19
33	Kecamatan Blanakan	14	2	16	10	2	12
34	Kecamatan Ciasem	14	3	17	13	3	16
35	Kecamatan Ciater	18	3	21	17	3	20
36	Kecamatan Cibogo	18	6	24	17	7	24
37	Kecamatan Cijambe	17	1	18	18	1	19
38	Kecamatan Cikaum	12	-	12	12	2	14
39	Kecamatan Cipeundeuy	8	3	11	8	4	12



Dinas/Instansi Pemerintah Government Agencies		2022			2023		
		Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total	Laki - laki / Male	Perempu an / Female	Jumlah / Total
40	Kecamatan Cipunagara	12	3	15	13	2	15
41	Kecamatan Cisolak	15	1	16	14	2	16
42	Kecamatan Comprang	16	-	16	15	-	15
43	Kecamatan Dawuan	11	7	18	10	5	15
44	Kecamatan Jalancagak	14	5	19	14	6	20
45	Kecamatan Kalijati	12	6	18	11	7	18
46	Kecamatan Kasomalang	12	5	17	11	5	16
47	Kecamatan Legonkulon	12	2	14	11	2	13
48	Kecamatan Pabuaran	13	3	16	12	4	16
49	Kecamatan Pagaden	20	4	24	20	3	23
50	Kecamatan Pagaden Barat	11	3	14	10	3	13
51	Kecamatan Pamanukan	13	1	14	13	1	14
52	Kecamatan Patokbeusi	18	-	18	18	-	18
53	Kecamatan Purwadadi	10	6	16	9	6	15
54	Kecamatan Pusakajaya	10	2	12	10	1	11
55	Kecamatan Pusakanagara	13	-	13	11	1	12
56	Kecamatan Sagalaherang	13	4	17	10	4	14
57	Kecamatan Serangpanjang	10	2	12	9	2	11
58	Kecamatan Subang	57	51	108	54	48	102
59	Kecamatan Sukasari	11	-	11	11	-	11
60	Kecamatan Tambakdahan	12	6	18	12	5	17
61	Kecamatan Tanjungsiang	14	1	15	13	1	14
Jumlah/Total		5.376	6.395	11.771			9.282

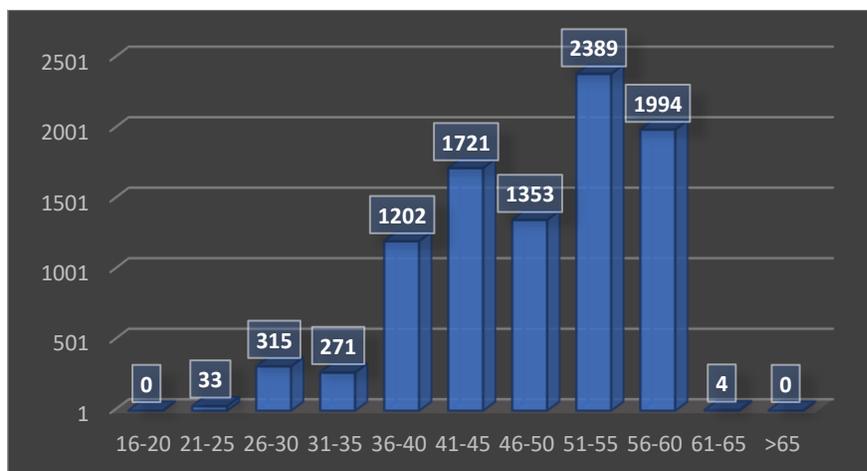
Sumber : BKPSDM Kabupaten Subang 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Subang 2022-2023

2022		2023	
Usia/Age	Jumlah/Total	Usia/Age	Jumlah/Total
(1)	(2)	(1)	(2)
16-20	0	16-20	0
21-25	128	21-25	33
26-30	589	26-30	315
31-35	640	31-35	271
36-40	1918	36-40	1202
41-45	1993	41-45	1721
46-50	1655	46-50	1353
51-55	2831	51-55	2389
56-60	2015	56-60	1994
61-65	2	61-65	4
>65	0	>65	0
Jumlah/Total	11.771	Jumlah/Total	9.282

Sumber : BKPSDM Kabupaten Subang 2024

Grafik 1.3
Jumlah dan Persentase PNSD Berdasarkan Kelompok Usia di
Kabupaten Subang Tahun 2023



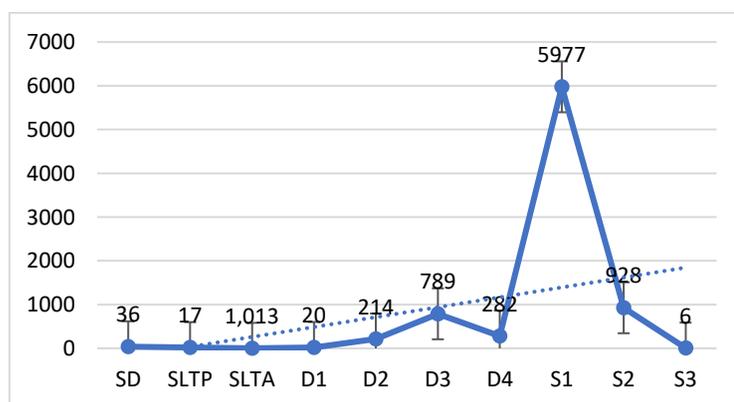
Sumber : BKPSDM Kabupaten Subang 2024

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Subang
Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2021 – 2023

2022		2023	
Tingkat	Jumlah Total	Tingkat	Jumlah Total
SD	43	SD	36
SLTP	27	SLTP	17
SLTA	1.089	SLTA	1.013
D1	26	D1	20
D2	367	D2	214
D3	875	D3	789
D4	279	D4	282
S1	8.253	S1	5.977
S2	807	S2	928
S3	5	S3	6
Jumlah Total	11.771	Jumlah Total	9.282

Sumber : BKPSDM Kabupaten Subang 2024

Grafik 1.4
Jumlah dan Persentase PNSD Berdasarkan Pendidikan Formal di
Kabupaten Subang Tahun 2023



Sumber : BKPSDM Kabupaten Subang 2024

1.2 Isu Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Isu strategis merupakan kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal dan perhatian khusus seperti pada Tabel diatas serta hasil pembobotan terhadap isu strategis tahun 2023, maka 7 isu strategis pembangunan Kabupaten Subang tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Subang, penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) dan belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik.

2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang strategis dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat potensi yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu akan berimplikasi terhadap lahirnya masyarakat yang memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara kearah kemajuan dan kemakmuran.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Subang masih belum dikatakan merata mengacu pada Sarana pelayanan kesehatan belum sesuai kebutuhan masyarakat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Subang juga perlu memfokuskan pada upaya perbaikan sitem Manajemen kesehatan.

Lebih lanjut Kejadian beberapa penyakit menular, tidak menular, gangguan mental, ancaman munculnya penyakit new emerging dan re-emerging serta Kejadian Luar Biasa (KLB) yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan. Perkembangan masalah

gizi semakin kompleks, selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus kita tangani secara serius. Selain itu sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan belum menyeluruh bagi seluruh masyarakat harus menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Subang.

4. Optimalisasi Penggalian Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata serta belum optimalnya pengembangan manajemen pariwisata dan aset pariwisata. Pada bidang kebudayaan terjadi beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Subang, hal tersebut disebabkan belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Subang, belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai Aset Pariwisata Subang, dan belum optimalnya pengembangan ragam Seni Subang.

5. Optimalisasi Penyediaan Infrastruktur

Penataan ruang merupakan salah satu akar permasalahan di semua aspek. Peraturan mengenai penggunaan lahan, penempatan lokasi industri menjadi hal utama yang harus diprioritaskan untuk menjalankan fungsi lainnya. Adanya Pelabuhan Patimban di utara menjadikan revisi zonasi RTRW dan RUTR menjadi hal yang harus segera dilakukan.

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang dengan sangat dinamis. Disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Subang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam kenyataannya kondisi infrastuktur di Kabupaten Subang masih jauh dari yang di harapkan. Kondisi tersebut

di sebabkan oleh adanya permasalahan yang di tandai persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 83,17 persen di tahun 2023. Ruas – ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan masih banyak dalam kondisi rusak yang disebabkan karena upaya peningkatan dan pemeliharaan jalan belum seimbang dibandingkan dengan penurunan kondisi kemantapan jalan.

6. Peningkatan Pengelolaan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Sektor lingkungan adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam konsep lingkungan hidup, interaksi yang terbangun di alam akan mempengaruhi satu sama lain, termasuk di dalamnya interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan menjadi cita-cita yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mencegah kerusakan alam dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat di daerahnya. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat merusak lingkungan sekitar, memperbaiki kondisi lingkungan yang saat ini ada agar menjadi lebih baik, dan mengedukasi masyarakat untuk bahu membahu berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

7. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2013 penduduk miskin sebesar 12,13 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 10,27 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,86



persen. Meskipun terjadi penurunan, namun persentase penduduk miskin Kabupaten Subang masih di bawah pesentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; Belum adanya standar mutu produk IKM/ UKM yang sesuai dengan tuntutan zaman dan konsumen serta Kurangnya promosi Produk IKM/UKM. Selain itu terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh rendahnya tindak lanjut investasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Subang 2018 - 2023

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang dilakukan dengan program Subang Jawara (Jaya, Istimewa dan Sejahtera). Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin sinergi, koordinasi dan sinkronisasi yang intens antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2019. Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD periode 2018- 2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera, dan Berkarakter”

Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi. Di sisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama (lima) tahun kedepan. Dari perspektif inilah, visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu :

- Bersih** : Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proporsional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;
- Maju** : Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
- Sejahtera** : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang

aman dan nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik;

Ber karakter : Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut “Panca Jimat–Akur untuk Subang Jawara” yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang ber karakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja.
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi, kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Misi 1 :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat;

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis teknologi informasi;
2. Menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan terpadu melalui e-planning dan e-budgeting guna tercipta pembangunan yang partisipatif dan terbuka;
3. Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui sistem e-budgeting, aspiratif, dan akomodatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat;

4. Membuka akses anggaran secara luas termasuk detil anggaran, mulai dari perencanaan sampai realisasi melalui sistem elektronik, agar masyarakat bisa ikut serta mengawasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis elektronik, transparan, sederhana, dan mudah terutama dalam proses perizinan dan administrasi kependudukan;
6. Membuat sistem pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah, dan langsung terakses kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Misi 2 :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal, dan pemerataan pembangunan perdesaan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya dengan sistem penganggaran yang maksimal;
2. Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
3. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar wilayah potensial;
4. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan (Rutilahu sebanyak 100 rumah);
5. Memperkuat infrastruktur dasar di kawasan perdesaan;
6. Memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan di wilayah ke-RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan;
7. Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal;
8. Optimalisasi peran BUMDes dan kelompok usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah.

Misi 3 :

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja.

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan dasar yang menjangkau seluruh wilayah;
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi dengan menerapkan sistem indikator rata-rata Uji Kompetensi Guru;
3. Melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai;
4. Menciptakan peluang kerja baru yang bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya melalui sistem rekrutmen yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia usaha;
5. Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan instansi lain untuk lebih mengutamakan putra-putri daerah.

Misi 4 :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi kepariwisataan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan lapangan usaha pertanian melalui pengembangan agroindustri;
2. Meningkatkan Produksi Pertanian dengan Optimalisasi Lahan Pertanian, sehingga tercapai Subang sebagai lumbung padi nasional;
3. Pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;

4. Meningkatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk peningkatan kualitas perusahaan daerah yang ada dan pembentukan perusahaan-perusahaan daerah baru;
5. Mengembangkan daerah industri dan pengembangan teknologi;
6. Menyelenggarakan sentra industri kecil dan mengembangkan usaha kecil dan menengah;
7. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Mengembangkan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
9. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
10. Pengembangan jaringan kualitas, permodalan, produksi, dan market bagi koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lainnya.
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara berkala
13. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun gedung kesenian dan mendirikan lembaga adat.

Misi 5 :

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
2. Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam upaya melaksanakan Undang-undang Kesehatan;
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan KSS (kartu subang sehat);
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Poned, dan layanan kesehatan pemerintah daerah lainnya;
5. Penyediaan ambulance gratis bagi warga;
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat pedesaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, dengan membangun RSUD baru di wilayah Pantura;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
9. Meningkatkan pengelolaan sampah;
10. Membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara lingkungan hidup tiap desa/kelurahan;
11. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Kabupaten Subang. Nilai pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, meliputi:

Bersih - Maju – Sejahtera – Berkarakter

Kabupaten Subang Jaya, Istimewa, dan Sejahtera adalah sebuah mimpi yang harus diwujudkan dalam 5 tahun yang akan datang. Jaya daerahnya, Istimewa pelayanan pemerintahannya, dan sejahtera masyarakatnya. Untuk terpenuhinya mimpi tersebut ditetapkanlah target utama pembangunan dalam lima tahun yang akan datang, yaitu Kabupaten Subang yang bersih, maju, sejahtera, dan berkarakter. Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kabupaten yang maju pembangunannya, daerah yang sejahtera rakyatnya, serta memiliki karakter tersendiri yang menjadikan identitas tersendiri yang menjadi kebanggaan warganya.

2.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Subang 2018 – 2023

Target indikator kinerja tahun 2023 pada RPJMD mengalami perubahan karena ada penyesuaian terhadap realisasi tahun yang dituangkan ke dalam RKPD Perubahan Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Subang 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target Capaian Kinerja RPJMD					PD Penganggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
Visi 1 : “Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahter dan Berkarakter”										
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat										
Tujuan 1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat	Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	CC	B	BB	BB	A	SETDA
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (62,24)	B (67,67)	BB (71,00)	BB (76,01)	A (80,50)	A (84,00)	SETDA
		Opini BK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	SETDA
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan										
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Serta	Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan jembatan, dan sarana	Persentase Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	54,8	59	68	77	86	95	DPUPR
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	52	56	66,5	77	87	97	DPUPR



Kabupaten Subang 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target Capaian Kinerja RPJMD					PD Penganggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
berkarakter kebudayaan lokal.	perhubungan yang berkualitas.	Persentase Ruas Jalan yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan	Persen	40	40	45	50	50	55	DISHUB
	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	70,34	72,21	72,78	73,75	73,92	74,49	DPKP
	Sasaran 5 : Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa.	Indeks Desa Membangun	Skor	0,64	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69	DPMD
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja										
Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal, religius dan berdaya saing	Sasaran 6 : Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,74	11,82	11,89	11,97	12,05	12,12	DISDIKBUD
		Rata - rata Lama Sekolah (RRLS)	Tahun	6,97	7,12	7,26	7,42	7,57	7,73	DISDIKBUD
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	8,65	8,50	8,45	8,40	8,35	8,30	DISNAKERTRANS
Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan Dan Kelautan, Perdagangan Serta Penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal										
Tujuan 4 : Terwujudnya percepatan	Sasaran 8 : Meningkatnya pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.257.160	1.269.732	1.282.429	1.295.253	1.308.205	1.320.777	DINAS PERTANIAN



Kabupaten Subang 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target Capaian Kinerja RPJMD					PD Penganggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan									
	Sasaran 9 : Meningkatnya peran industri keratif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DKUPP
	Sasaran 10 : Meningkatnya investasi	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	2.188,45	2.188,45	2.516,72	2.894,22	3.328,36	3.827,61	DPMPTSP
		Nilai Investasi PMA	Milyar Rupiah	7.473,40	7.473,40	8.220,74	9.042,81	9.947,10	10.941,80	DPMPTSP
Sasaran 11 : Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,55	10,34	10,14	9,93	9,74	9,54	DINSOS	
Tujuan 5 : Terwujudnya kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal	Sasaran 12 : Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	6.516.221	6.842.032	7.184.133	7.543.339	7.920.505	8.316.530	DISPARPORA
Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.										
Tujuan 6 : Terwujudnya peningkatan taraf kesehatan masyarakat	Sasaran 13 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,84	71,97	72,10	72,23	72,36	72,50	DINKES



Kabupaten Subang 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target Capaian Kinerja RPJMD					PD Penganggung Jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan 7 : Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan	Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	57	57	57	58	58	58	DLH
	Sasaran 15 : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Skor	166	165	164	163	162	161	BPBD

2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran;
6. Kinerja pegawai.

Target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu kepada RKPD Perubahan Tahun 2023. Adapun ikhtisar dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	A
		Nilai Evaluasi AKIP	A (84,00)
		Opini BK	WTP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
3	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	Persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik	95%
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	97%
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	55%
4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase ketersediaan rumah layak huni	74,49%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	Indeks Desa Membangun	0,69
6	Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,12 Tahun
		Rata – Rata Lama Sekolah	7,73 Tahun
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,30%
8	Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Jumlah produksi padi	1.320.777 Ton
9	Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pembangunan ekonomi	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1%
10	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 3.827.610.000
		Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 10.941.800.000
11	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	9,54%
12	Meningkatnya Pariwisata yang Berdaya Saing	Jumlah kunjungan wisatawan	8.316.530 Orang
13	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,50 Tahun
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58
15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	161

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah
Kabupaten Subang Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1	Program Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kabupaten Subang	Rp. 2.564.901.035.543,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 322.927.989.107,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 29.900.000,00
4	Program Pengelolaan SDA	Rp. 41.378.105.365,00
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9.706.246.819,00
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp. 31.325.010,00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 22.716.908.191,00
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 7.745.446.270,00
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 2.176.503.020,00
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 119.223.951.667,00
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.458.705.000,00
12	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 289.359.500,00
13	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 947.120.000,00
14	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 811.016.000,00
15	Program Pengembangan UMKM	Rp. 766.280.000,00
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2.434.731.000,00
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 46.589.961.250,00
20	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350.600.000,00
21	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 275.100.000,00
22	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.874.730.000,00
23	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 10.250.000,00



No	Program	Anggaran
24	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.572.924.000,00
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.837.055.000,00
26	Program Penanganan Bencana	Rp. 874.381.200,00
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 78.026.700,00
28	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 622.317.349,00
29	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 86.460.000,00
30	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp. 280.268.250,00
31	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 128.354.540.221,00
32	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 389.245.000,00
33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.311.269.500,00
34	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 101.750.000,00
35	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 162.955.000,00
36	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 2.064.474.622,00
37	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.610.478.500,00
38	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 43.366.961.250,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.333.358.370.334,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Bupati Subang Tahun 2023. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	$\geq 91\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$50\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Pengukuran terhadap capaian sasaran strategis dilakukan setelah mengetahui capaian dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan membandingkan antara target dan realisasinya.

Capaian sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2023				
				Target	Realisasi	Capaian	Rata - Rata Capaian Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	A (80,00)	CC (70,86)	88,58	Dalam Proses	Dalam Proses
		2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (84,00)	B (68,32)	81,33		
		3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	Dalam Proses	Dalam Proses		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (76,61)	Baik (85,03)	110,99	110,99	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Jembatan, dan Sarana Perhubungan yang berkualitas	5	Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	95,00	83,17	87,55	91,86	Sangat Tinggi
		6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	97,00	90,67	93,47		
		7	Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan Yang Berkeselamatan	55,00	52,00	94,55		
4	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	8	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	74,49	94,62	127,02	127,02	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	9	Indeks Desa Membangun	0,69	0,78	113,64	113,64	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Derajat Pendidikan	10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,12	11,91	98,27	97,32	Sangat Tinggi
		11	Rata - Rata Lama Sekolah	7,73	7,45	96,38		
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,30	7,65	108,50	108,50	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Pertanian yang Mandiri Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan	13	Jumlah Produksi Padi	1.320.777,00	1.154.800,68	87,43	87,43	Tinggi

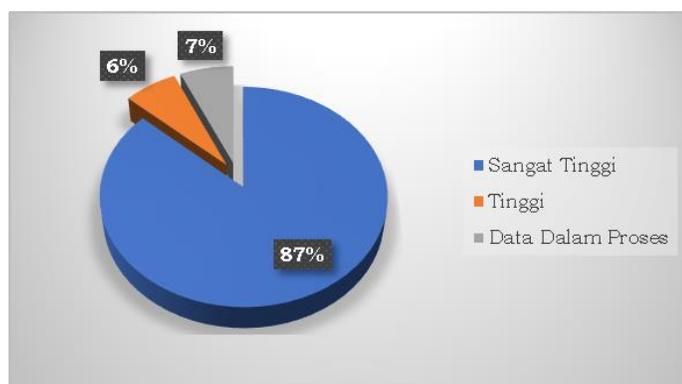
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2023				
				Target	Realisasi	Capaian	Rata - Rata Capaian Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
9	Meningkatnya Peran Industri Kreatif dan Perdagangan Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi	14	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	0,01	0,04	400,00	400,00	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Investasi	15	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	3.827.610.000	5.159.427.800.000	134.795,02	71.756,60	Sangat Tinggi
		16	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing	10.941.800.000	953.925.694.598	8.718,18		
11	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	9,54	9,52	100,21	100,21	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Pariwisata yang Berdaya Saing	18	Jumlah Kunjungan Wisatawan	8.316.530	8.319.935	100,04	100,04	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	19	Angka Harapan Hidup	72,50	73,24	101,02	101,02	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,00	60,47	104,26	104,26	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	21	Indeks Resiko Bencana	161,00	143,43	112,25	112,25	Sangat Tinggi

Sumber : BP4D Kabupaten Subang 2023

Dari tabel tersebut terlihat grafik rata - rata capaian sasaran strategis sebagai berikut :

Grafik 3.1

**Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023**



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Data diatas menunjukkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada tahun 2023 yakni tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023. Adapun capaian kinerja dari tahun pertama RPJMD yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2019 - 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)												
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC (50,00)	CC (56,78)	113,56	B (60,00)	CC (57,20)	95,33	BB (70,00)	CC (58,33)	83,33	BB (70,00)	CC (58,03)	82,90	A (80,00)	BB (70,86)	88,58
	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (62,24)	B (62,20)	99,94	BB (71,00)	B (66,70)	93,94	BB (76,01)	B (67,12)	88,30	A (80,50)	B (67,33)	83,64	A (84,00)	B (68,32)	81,33
	Opini BK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	Dalam Proses	Dalam Proses									
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	Baik (76,61)	Baik (81,38)	106,23	Baik (76,61)	Baik (82,35)	107,49	Baik (76,61)	Baik (83,32)	108,76	Baik (76,61)	Baik (84,31)	110,05	Baik (76,61)	Baik (85,03)	110,99
Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan jembatan, dan sarana perhubungan	Persentase Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	59,00	59,33	100,56	68,00	61,22	90,03	77,00	60,22	78,21	86,00	64,76	75,30	95,00	83,17	87,55
	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	56,00	56,00	100,00	66,50	65,50	98,50	77,00	95,00	123,38	87,00	90,33	103,83	97,00	90,67	93,47



Kabupaten Subang 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)												
yang berkualitas.	Persentase Ruas Jalan yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan	Persen	40,00	39,20	98,00	45,00	40,00	88,89	50,00	50,00	100,00	50,00	51,00	102,00	55,00	52,00	94,55
Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	72,21	71,97	99,67	72,78	94,07	129,25	73,75	94,37	127,96	73,92	94,95	128,45	74,49	94,62	127,02
Sasaran 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	Indeks Desa Membangun	Skor	0,65	0,67	103,08	0,65	0,69	106,15	0,67	0,72	107,46	0,68	0,75	110,29	0,69	0,78	113,64
Sasaran 6 : Meningkatkan derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,82	11,69	98,90	11,89	11,70	98,40	11,97	11,71	97,83	12,05	11,78	97,76	12,12	11,91	98,27
	Rata - Rata Lama Sekolah (RRLS)	Tahun	7,12	6,85	96,21	7,26	7,10	97,80	7,42	7,11	95,82	7,57	7,2	95,11	7,73	7,45	96,38
Sasaran 7 : Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	8,50	8,50	100,00	8,45	8,48	99,65	8,40	9,77	85,98	8,35	7,77	107,46	8,30	7,65	108,50



Kabupaten Subang 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 8 : Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.269.732,00	1.330.737,00	104,80	1.282.429,00	1.313.741,66	102,44	1.295.253,00	1.260.942,84	97,35	1.308.205,00	1.264.572,95	96,66	1.320.777,00	1.154.800,68	87,43
Sasaran 9 : Meningkatnya peran industri keratif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.	Persentase Peningkatan Omzet UMKM	Persen	0,01	0,02	200,00	0,01	-0,05	-500,00	0,01	0,023	230,00	0,01	0,03	300,00	0,01	0,04	400,00
Sasaran 10 : Meningkatnya investasi	Nilai Investasi PMDN	Rupiah	2.188.450.000	1.950.195.797.468	89.113,11	2.516.720.000	829.932.645.087	32.976,76	2.894.220.000	25.551.773.958.153	882.855,28	3.328.360.000	1.719.866.600.000	51.673,09	3.827.610.000	5.159.427.800.000	134.795,02
	Nilai Investasi PMA	Rupiah	7.473.400.000	178.766.829.315.620	2.392.041,50	8.220.740.000	48.128.340.190.000	585.450,22	9.042.810.000	13.425.203.806.000	148.462,74	9.947.100.000	1.307.620.923.811	13.145,75	10.941.800.000	953.925.694.598	8.718,18



Kabupaten Subang 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)												
Sasaran 11 : Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,34	8,12	127,34	10,14	9,31	108,92	9,93	10,03	99,00	9,74	9,75	99,90	9,54	9,52	100,21
Sasaran 12 : Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	6.842.032	6.808.535	99,51	7.184.133	382.372	5,32	7.543.339	4.317.302	57,23	7.920.505	7.934.089	100,17	8.316.530	8.319.935	100,04
Sasaran 13 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,97	72,13	100,22	72,10	72,35	100,35	72,23	72,58	100,48	72,36	72,92	100,77	72,50	73,24	101,02
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	57,00	62,89	110,33	57,00	60,11	105,46	58,00	59,38	102,38	58,00	55,69	96,02	58,00	60,47	104,26
Sasaran 15 : Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Skor	165,00	175,20	94,18	164,00	171,91	95,40	163,00	168,78	96,58	162,00	130,38	124,25	161,00	143,43	112,25

Berikut analisis terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 sebagaimana data pada tabel yang telah disampaikan sebelumnya.

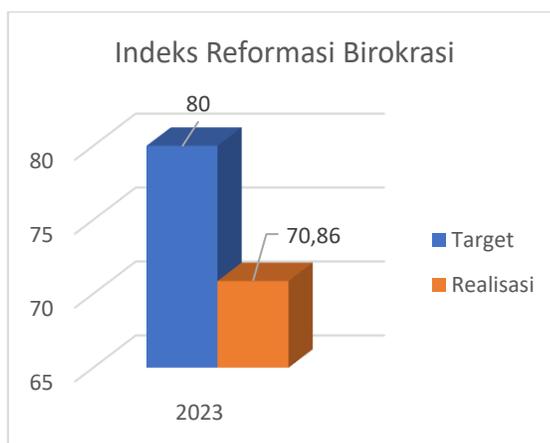
3.1.1 Sasaran 1 (Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah)

Sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yakni :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, yakni suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bag. Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Indeks Reformasi Birokrasi**” adalah BB (70,86) dari target A (80,00) yang direncanakan, sehingga capaian kinerjanya tidak tercapai. Namun di tahun 2023 ini mengalami kenaikan yang signifikan.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Subang di tahun 2023 adalah 70,86 atau kategori “BB” yang artinya “Baik”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Hasil Nilai Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2021 - 2023

No	Komponen Penilaian	Tahun	Nilai
1	Indeks RB	2021	58,33
2	Indeks RB	2022	58,03
3	Indeks RB General dan Tematik	2023	70,86

Sumber : Kementerian PANRB

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang telah berupaya untuk mewujudkan kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 12,83 poin dan mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun nilai hasil evaluasi tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan sehingga belum maksimalnya perangkat daerah dalam penginputan data pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik RB General maupun RB Tematik agar mencapai target indeks dengan predikat A.

Beberapa upaya yang terus dijalankan dalam rangka peningkatan program RB General adalah :

- Mensinergikan target atas kegiatan utama dengan memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb Nomor 739 Tahun 2023);
- Memperbaiki cascading dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound);
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi menuju zona integritas;
- Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kabupaten, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik

- dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;
- e. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
 - f. Tetap melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten.

Adapun beberapa upaya yang terus dijalankan dalam rangka peningkatan program RB Tematik adalah :

- a. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi;
- b. Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;
- c. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup.

Gambar 3.1

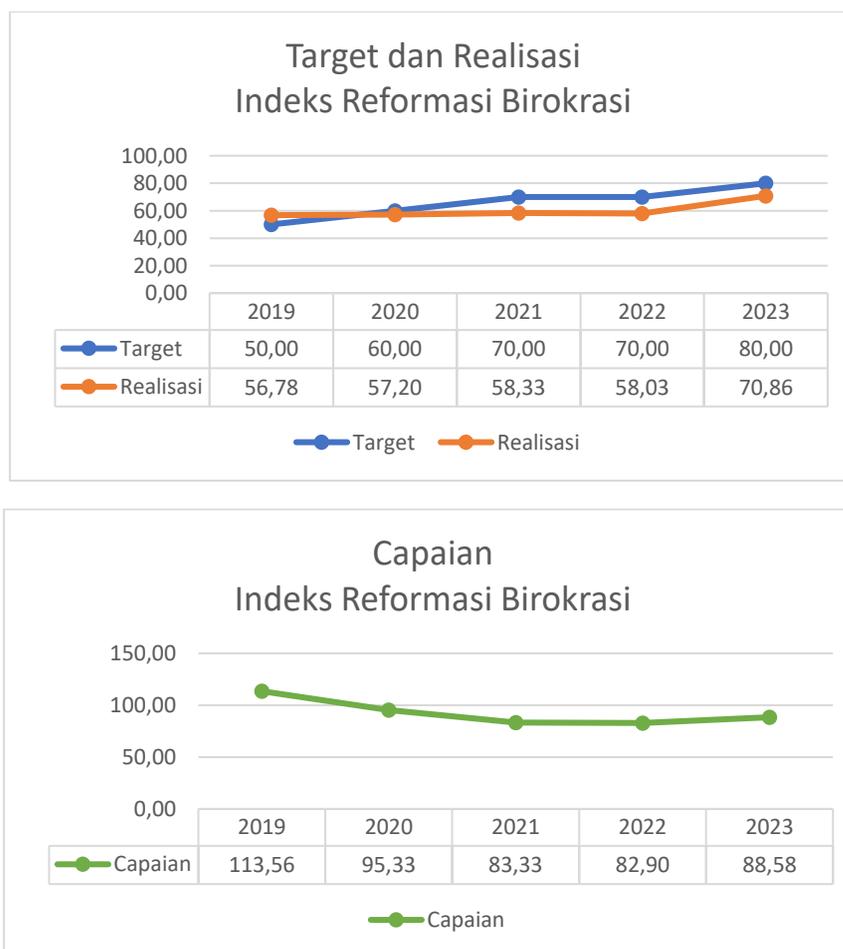
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi



Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kab. Subang 2023*

Adapun perbandingan capaian IRB pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Subang tahun 2023 dengan standar nasional dapat dilihat sebagai berikut

Gambar 3.2
Rata – Rata Indeks Reformasi Birokrasi

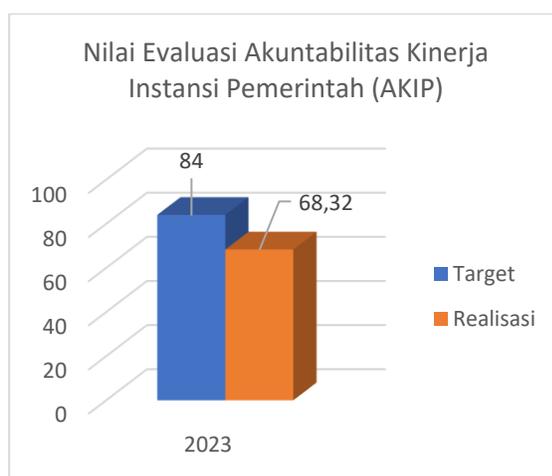


Sumber : Kemenpan RB

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa rata – rata Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 59,32 sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Subang berada diatas rata – rata IRB nasional.

2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yakni evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Nilai AKIP dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**” adalah B (68,32) dari target A(84,00) yang direncanakan. Sehingga capaian kinerja tidak tercapai dengan persentase capaian kinerjanya 81,33%. Namun hasil evaluasi AKIP Kabupaten Subang tahun 2023 mengalami kenaikan nilai.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2022 - 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	21,91	23,33
2	Pengukuran Kinerja	30	17,10	17,23
3	Pelaporan Kinerja	15	10,82	11,02
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	16,74
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67.33	68.32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber: Kementerian PANRB 2023

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah mendapatkan kenaikan nilai yaitu implementasi AKIP sudah berjalan baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja agar mencapai target.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP, antara lain :

- a. Memperkuat komitmen, baik dengan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kabupaten, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;
- c. Menjabarkan kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi dengan memastikan kesesuaian antara sasaran, indikator maupun target yang ditetapkan;

- d. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan agar seluruhnya mendukung tercapainya sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah;
- e. Melakukan reviu terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja;
- f. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;
- g. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemkab maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- h. Mendorong seluruh PD menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
- i. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD;
- j. Melaksanakan kaji banding terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat AA (sangat memuaskan) 6 tahun berturut-turut yakni Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 3.3

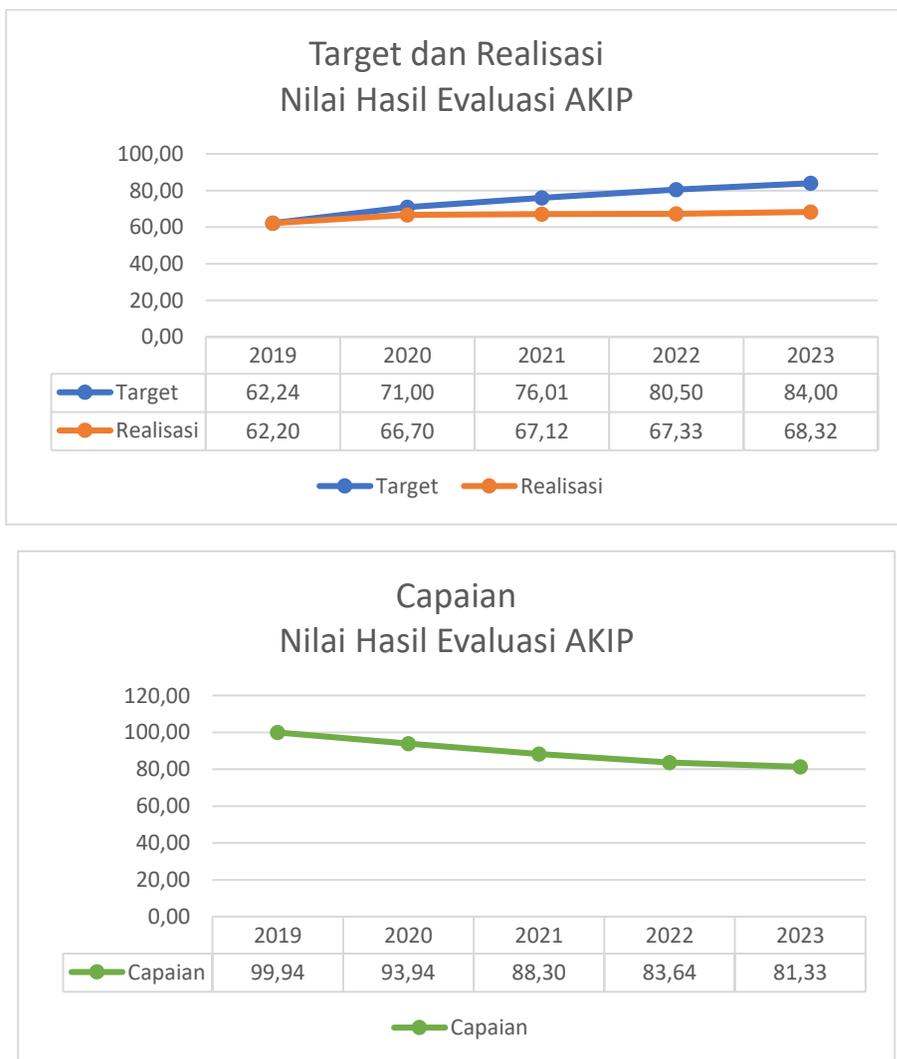
Kaji Banding terkait SAKIP ke Pemprov DIY



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Subang 2024

Adapun perbandingan capaian Nilai AKIP pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2019 - 2023



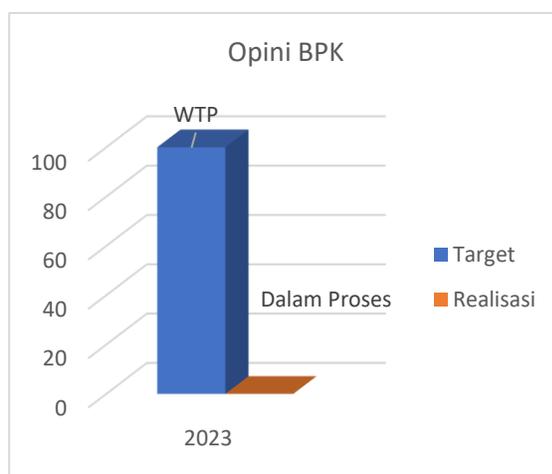
Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian indikator Nilai AKIP Kabupaten Subang tahun 2023 dengan standar nasional dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata AKIP nasional.

Terkait peningkatan nilai rata-rata AKIP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin.

3. Opini BPK, yaitu pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Nilai AKIP dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Opini BPK Tahun 2023



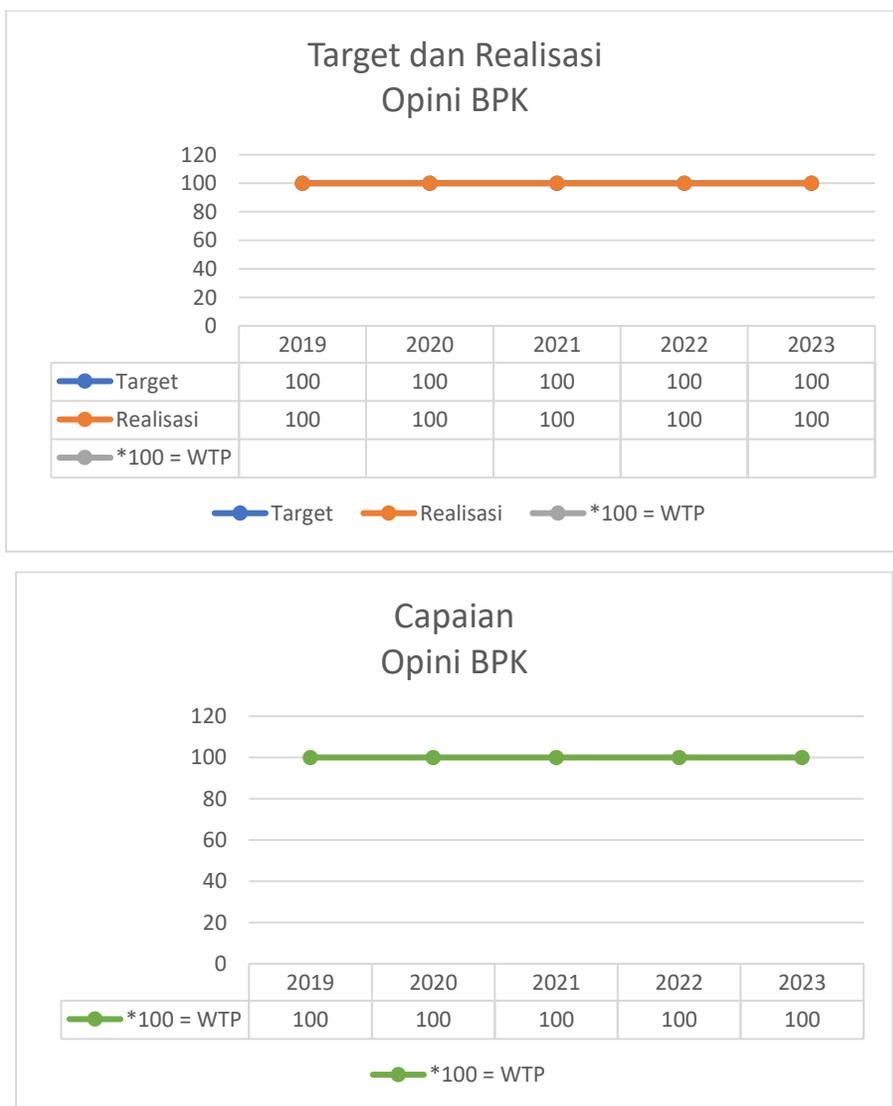
Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)” masih dalam proses penilaian oleh BPK sehingga belum bisa ditentukan capaian dari indikator Opini BPK. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Subang terus melakukan upaya untuk memaksimalkan realisasi indikator Opini BPK agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sudah terbukti 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapatkan predikat opini WTP. Keberhasilan meraih predikat WTP dapat diperoleh dari :

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Arus Kas;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun perbandingan capaian Opini BPK pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Opini BPK Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

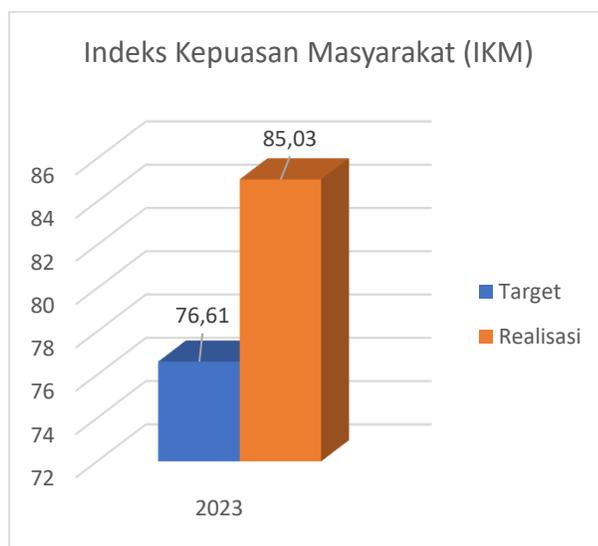
3.1.2 Sasaran 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik)

Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

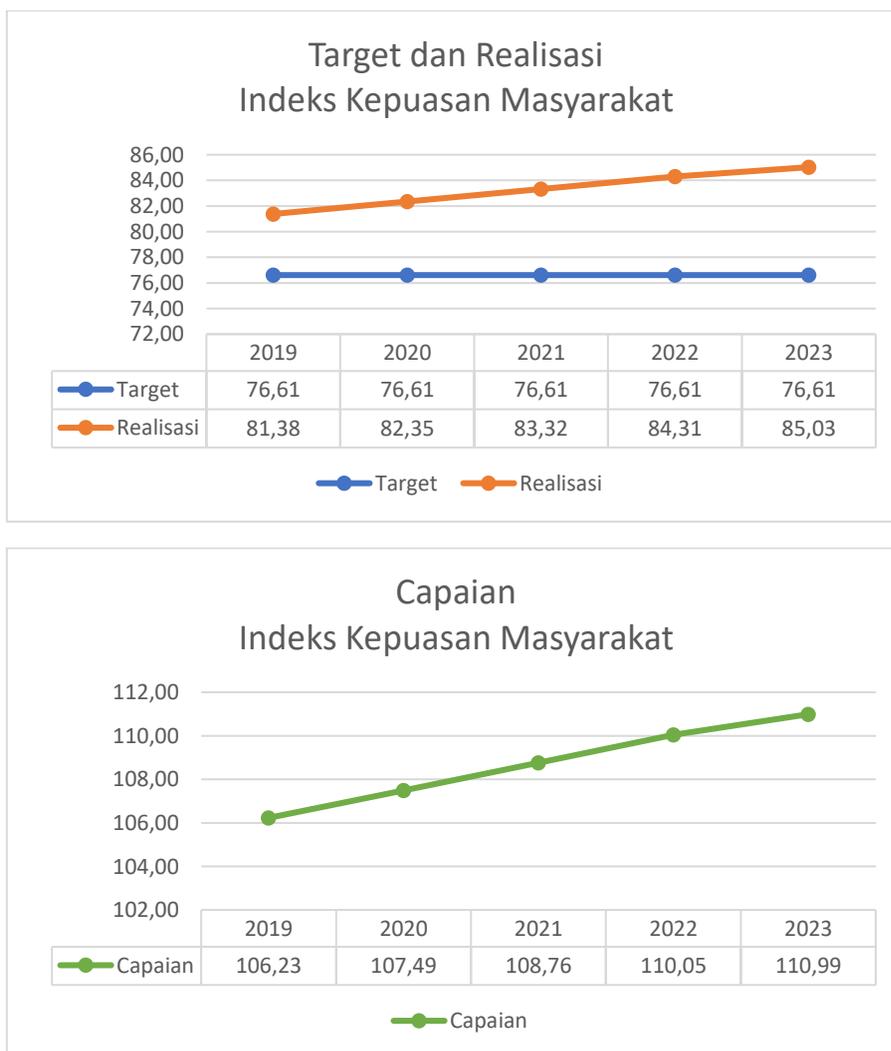
Realisasi Indikator Kinerja Utama “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” mencapai nilai 85,03 dengan predikat Baik dan capaian kinerjanya tercapai.

Hasil survey pada Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Subang Tahun 2023 dinilai dari 9 (sembilan) unsur layanan sebagai berikut :

1. Persyaratan dengan nilai 81,75;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai 81,5;
3. Waktu Penyelesaian dengan nilai 80,75;
4. Biaya/Tarif dengan nilai 92;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dengan nilai 82;
6. Kompetensi Pelaksana dengan nilai 83;
7. Perilaku Pelaksana dengan nilai 83;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 92,75;
9. Sarana dan Prasarana dengan nilai 88,25.

Adapun perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Jembatan, dan Sarana Perhubungan yang berkualitas)

Sasaran 3 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yakni :

1. Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik, yaitu persentase yang menyatakan ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik.
 Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.10

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator **“Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik”** adalah sebesar 83.17 dari target sebesar 95 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 87.55 dan capaian kinerjanya tidak tercapai.

Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan beberapa faktor berikut :

- Belum meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan pada wilayah pantai utara Kabupaten Subang dibandingkan dengan wilayah tengah maupun wilayah selatan Kabupaten Subang;
- Semakin meningkatnya kendaraan bermuatan berat yang melintasi Jalan Kabupaten, kondisi tanah dasar jalan yang tidak mendukung, adanya curah hujan yang tinggi maupun banjir yang menggenangi jalan cukup lama menyebabkan jalan kabupaten cepat rusak terutama di daerah pantai utara Kabupaten Subang;
- Ruas jalan utama yang menghubungkan antar Kabupaten Subang dengan Kabupaten lain banyak yang berada dalam kondisi rusak . Perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang karena status jalan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Pusat (Jalan Provinsi dan Jalan Nasional);

- d. Kondisi struktur tanah yang cenderung labil/gerak mempercepat berkurangnya umur pakai jalan.

Adapun beberapa upaya yang terus dijalankan dalam rangka mencapai target sebagai berikut :

- a. Penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pantai utara;
- b. Untuk memperbaiki struktur tanah sebagai lapis permukaan jalan kita menggunakan konstruksi beton sehingga dapat melayani aktivitas pengguna jalan tersebut;
- c. Untuk memperbaiki kondisi ruas jalan provinsi kita berupaya melakukan konsultasi, memberikan informasi, koordinasi dan membuat usulan ke provinsi dan pusat untuk kegiatan perbaikan jalan tersebut;
- d. Terhadap struktur tanah yang cenderung labil/gerak dengan melihat menggunakan 2 pilihan yaitu rigid dan hotmik tergantung *existing* kondisi jalan.

Gambar 3.4
Survey Kondisi dan Perbaikan Jalan



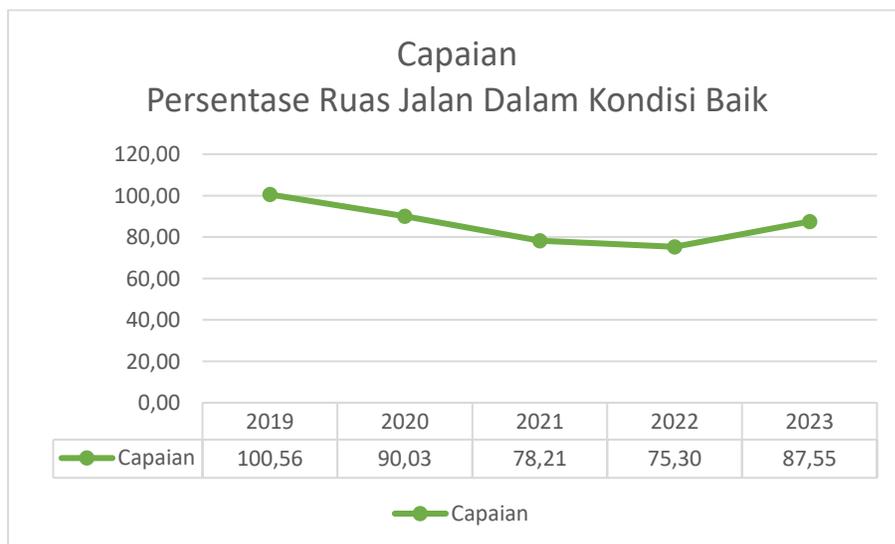
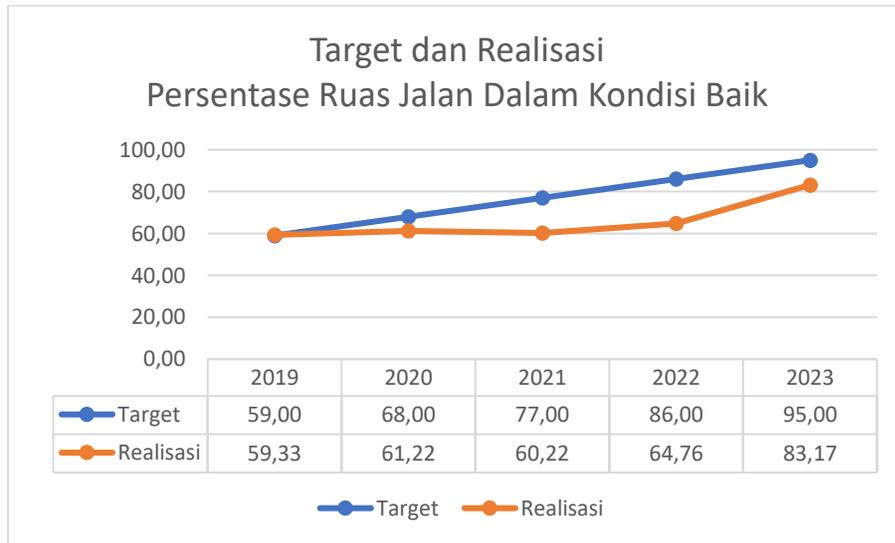
Sumber : DPUPR 2023

Adapun perbandingan capaian Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

Persentase Ruas Jalan Dalam Bondisi Baik Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

2. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik, yaitu persentase perbandingan jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun n dengan total jumlah jembatan keseluruhannya tahun n.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2023

Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator **“Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik”** adalah sebesar 90.67 dari target sebesar 97 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93.47 dan capaian kinerjanya tidak tercapai.

Pada tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan pekerjaan jembatan yang berada di ruas jalan kabupaten dan telah dilaksanakan pula kegiatan jembatan (jalan poros desa dan lingkungan). Jumlah jembatan yang ada pada ruas jalan kabupaten adalah 296 buah jembatan, kondisinya dalam keadaan baik dan sedang.

Gambar 3.5

Jembatan Sebelum Perbaikan dan Sesudah Perbaikan

Sumber : DPUPR Kab. Subang 2023

Capaian kinerja persentase jembatan pada ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 95,02% dan kondisi rusak mencapai 4,98% dilihat pada tabel di bawah ini:

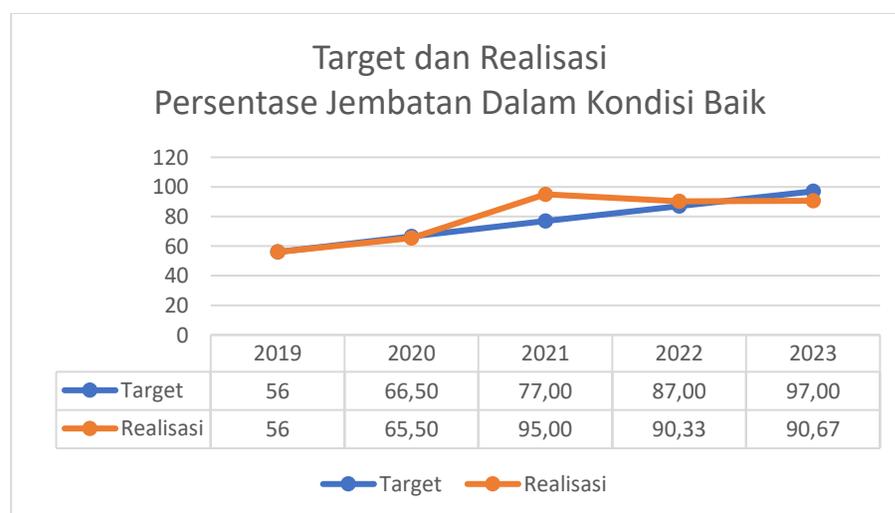
Tabel 3.6
Kondisi Jembatan Kabupaten di Kabupaten Subang Pada Tahun 2023

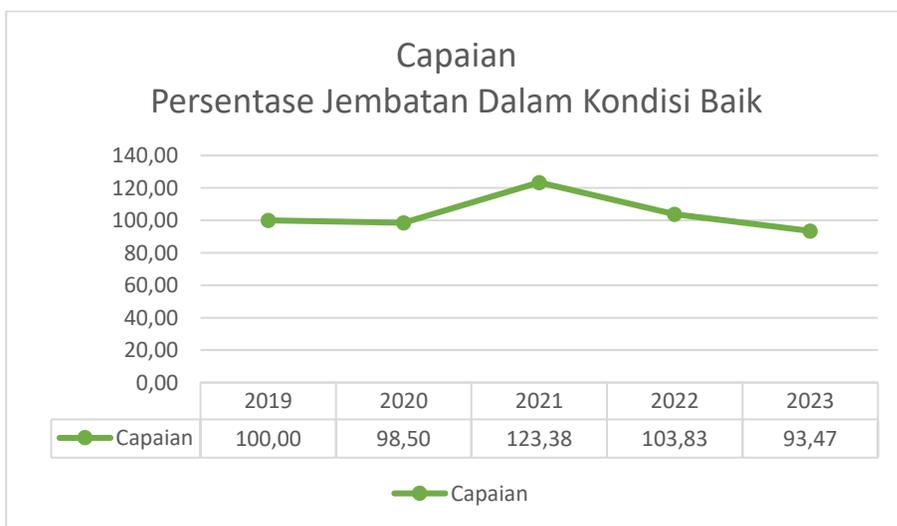
No	Panjang Jembatan Kabupaten	2023	
		Luas (KM)	%
1	Kondisi Mantap	16.186,65	78,38%
2	Kondisi Rusak	4.464,58	21,62%
	JUMLAH	20.651,23	100

Sumber : DPUPR Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023





Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

- Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan Yang Berkeselamatan, yaitu persentase yang menyatakan seberapa banyak ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan jalan seperti PJU, marka jalan, dan rambu rambu. Persentase ruas jalan kewenangan kabupaten yang sudah terpasang perlengkapan jalan menunjukkan tingkat keselamatan pada ruas jalan tersebut.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.14

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Persentase Ruas Jalan yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan**” adalah sebesar 52 dari target sebesar 55 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 94.55 dan capaian kinerjanya tidak tercapai. Faktor ketidakberhasilan mencapai target yaitu :

- a. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid
- b. Penetapan target yang tidak realistis

Adapun solusi yang akan dilakukan dalam mencapai target yaitu perlu dilakukan peningkatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data terkait kondisi ruas jalan dan kelengkapan jalan yang berkeselamatan.

Gambar 3.6

**Jalan Yang Dilengkapi Dengan Kelengkapan
Penerangan Jalan Umum**



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Persentase Ruas Jalan yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan yang Berkeselamatan pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Persentase Ruas Jalan yang Dilengkapi Jalan yang Berkeselamatan
Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman)

Sasaran 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni, yakni merehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari indikator Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.16

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**” adalah sebesar 94.62 dari target sebesar 74.49 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 127.02 dan capaian kinerjanya tercapai.

Capaian kinerja yang mencapai target ini berkat kerjasama dengan pemerintahan desa dan kelurahan serta masyarakat yang mendukung pencapaian sasaran melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan ketersediaan rumah layak huni.

Faktor pendukung pencapaian sasaran dan pencapaian indikator ini adalah :

- Dukungan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas
- Dukungan SDM ASN yang memiliki kompetensi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pencapaian sasaran

Analisis kualitas rumah layak huni yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran adalah ketersediaan rumah layak huni dimana sasaran tersebut diatas didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala yang didukung dengan anggaran, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran Program Peningkatan Kualitas Perumahan

Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	Efisiensi
Peningkatan Pelayanan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS)	2022	0	0	100%	0
	2023	0	0	100%	0
Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	2022	8.967.500.000	8.853.601.950	100%	1,3%
	2023	26.574.200.000	26.255.144.000	98%	2%

Gambar 3.7

Program Rumah Layak Huni



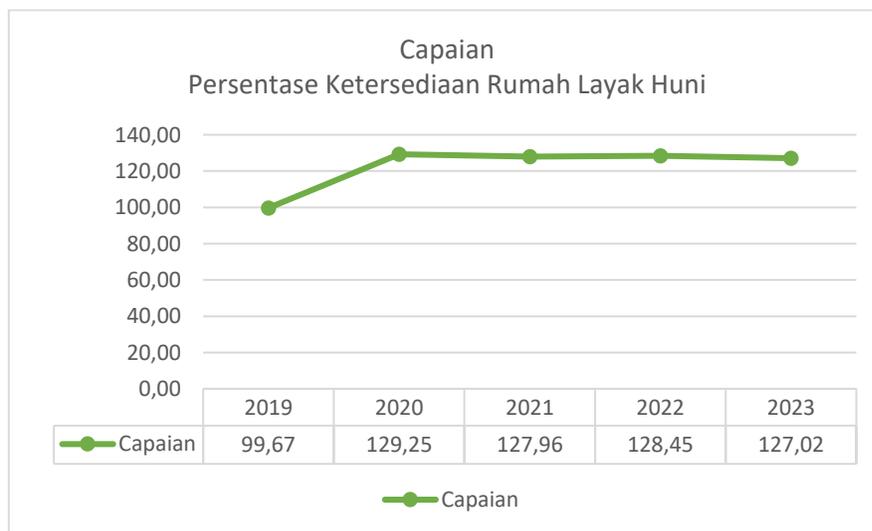
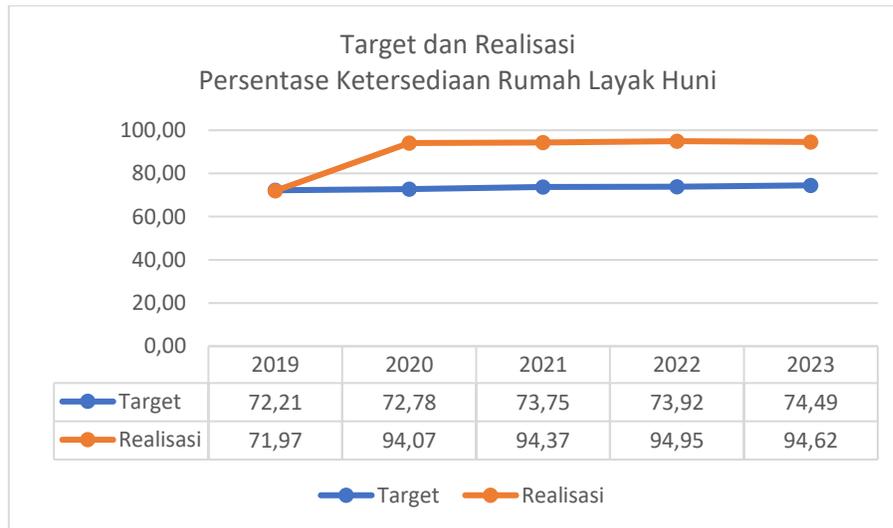
Sumber : DPKP Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.17

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019 - 2023



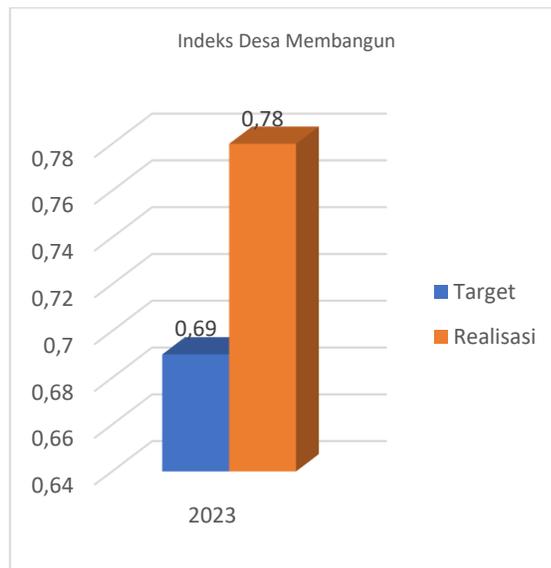
Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.5 Sasaran 5 (Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa)

Sasaran 5 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Desa Membangun, yakni Indeks kopsit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks yakni indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Indeks Desa Membangun dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa
Membangun Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “**Indeks Desa Membangun**” adalah sebesar 0.7841 dari target sebesar 0.69 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113.64 dan capaian kinerjanya tercapai. Tercapaiannya target kinerja Indeks Desa Membangun dikarenakan faktor pendukung sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
- b. Dukungan SDM DPMD yang memiliki kompetensi.

Adapun upaya yang telah dilakukan sehingga tercapainya target tersebut yaitu :

- a. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Desa
- b. Bimtek Siskeudes
- c. Bimtek Aparatur Desa
- d. Bimtek Manajemen Pemdes
- e. Bimtek Penyusunan RPJMDes dan APBDes
- f. Bimtek bantuan ADD dan DD
- g. Bimtek Pengurus BPD
- h. Bimtek Kapasitas dan Pelatihan bagi Kepala Desa
- i. Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Kades dan Sekdes

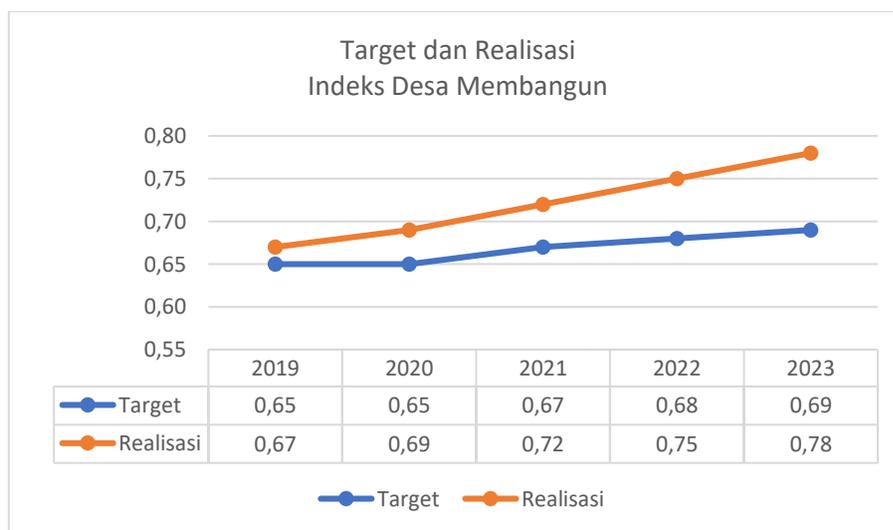
Gambar 3.8
Kegiatan Sosialisasi Dan Verifikasi Pelaporan IDM

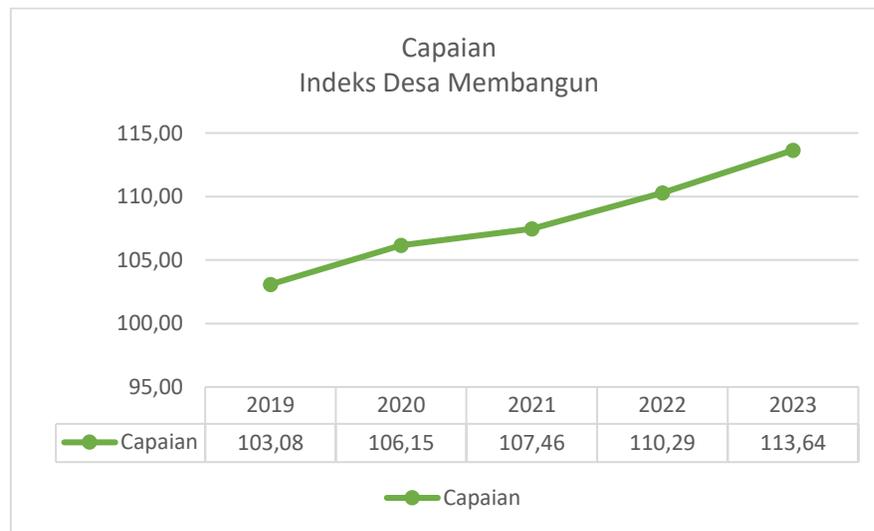


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Indeks Desa Membangun Tahun 2019 - 2023





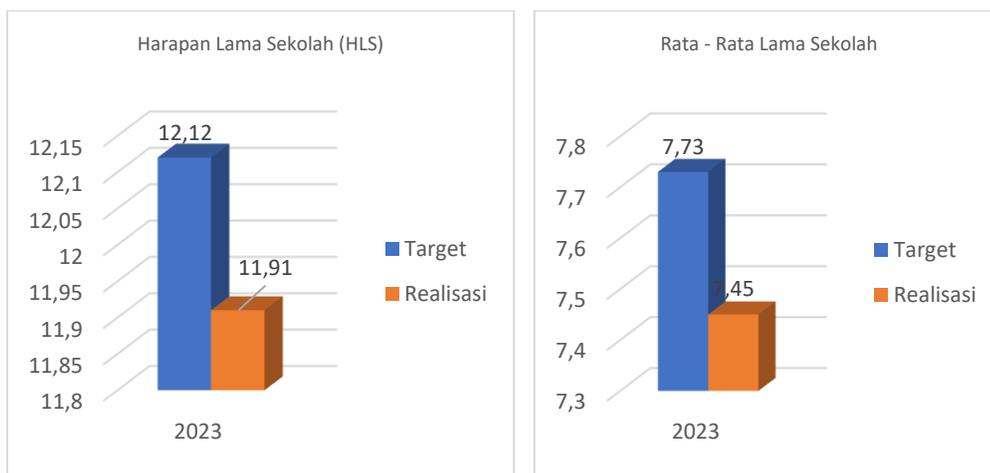
Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.6 Sasaran 6 (Meningkatnya Derajat Pendidikan)

Sasaran 6 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yakni :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
2. Rata – Rata Lama Sekolah (RRLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Grafik 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
HLS dan RRLS Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Harapan Lama Sekolah (HLS)**” adalah sebesar 11.91 dari target sebesar 12.05 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.84 dan capaian kinerjanya tidak tercapai.

Realisasi Indikator “**Rata – Rata Lama Sekolah (RRLS)**” adalah sebesar 7.45 dari target sebesar 7.73 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.38 dan capaian kinerjanya tidak tercapai.

Penyebab tidak tercapainya target HLS dan RRLS :

- Indikator perhitungan RRLS/HLS berdasarkan jumlah penduduk diatas usia 25 tahun serta variable perhitungan RRLS/HLS cukup luas, sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hanya memiliki data siswa usia sekolah PAUD, SD, SMP, Kesetaraan Paket A dan B sederajat, berdasarkan perhitungan rata rata usia PAUD 5-6 tahun, SD 7-12 tahun, dan SMP 13-15 tahun;
- Faktor ekonomi berupa tingkat kemiskinan masih yang tinggi;
- Layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak kepada tingkat putus sekolah;

- d. Rata-rata keberadaan unit sekolah baru pada wilayah kecamatan, sehingga aksesnya relatif jauh dari pemukiman penduduk dan membutuhkan biaya transportasi;
- e. Biaya pendidikan dan beban ketergantungan juga mempengaruhi pemerataan pendidikan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Angka Harapan Lama sekolah dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang, kelas, pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan. Sosialisasi minat belajar usia dini. Sosialisasi minat belajar 12 tahun;
- b. Memaksimalkan penyaluran Beasiswa Miskin dan Beasiswa Prestasi serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat maupun Daerah;
- c. Dukungan alokasi anggaran pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah.

Gambar 3.9

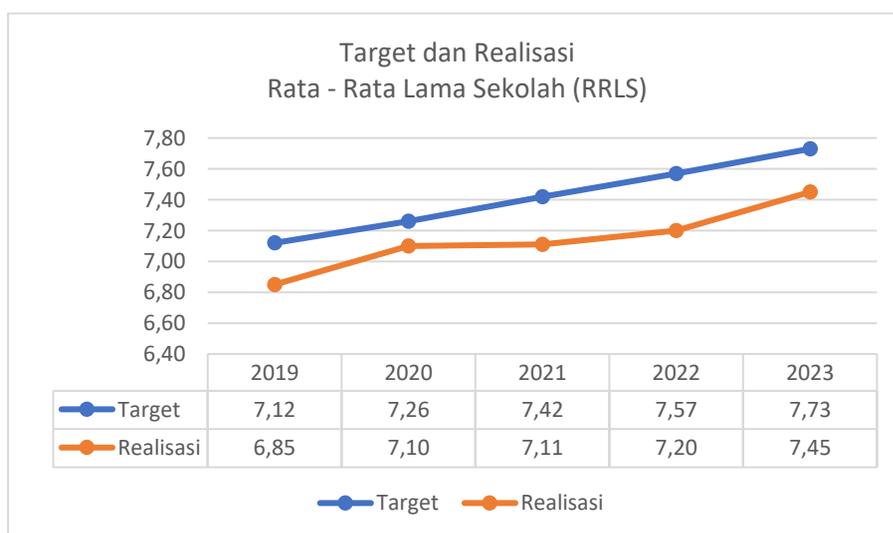
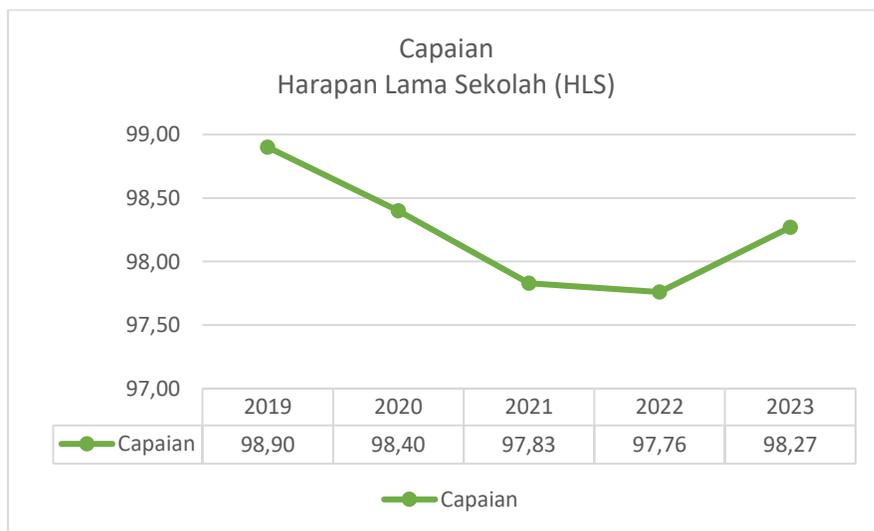
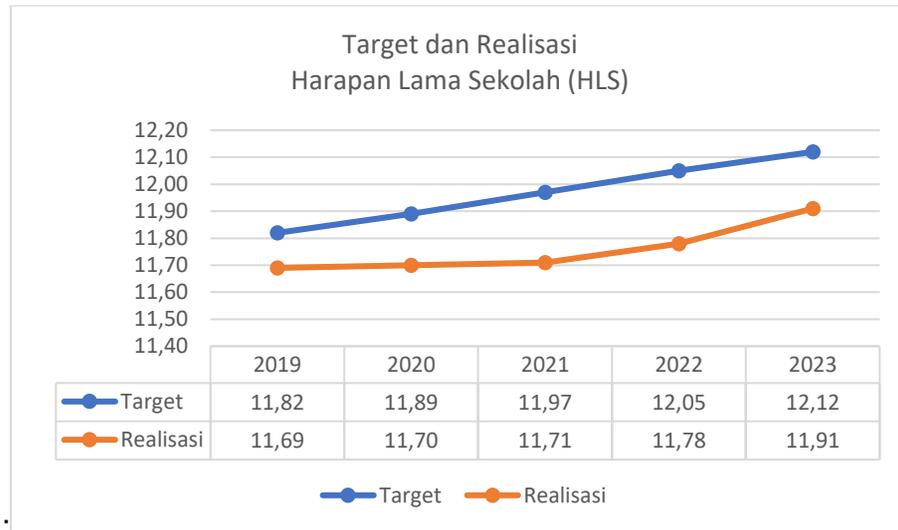
Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan

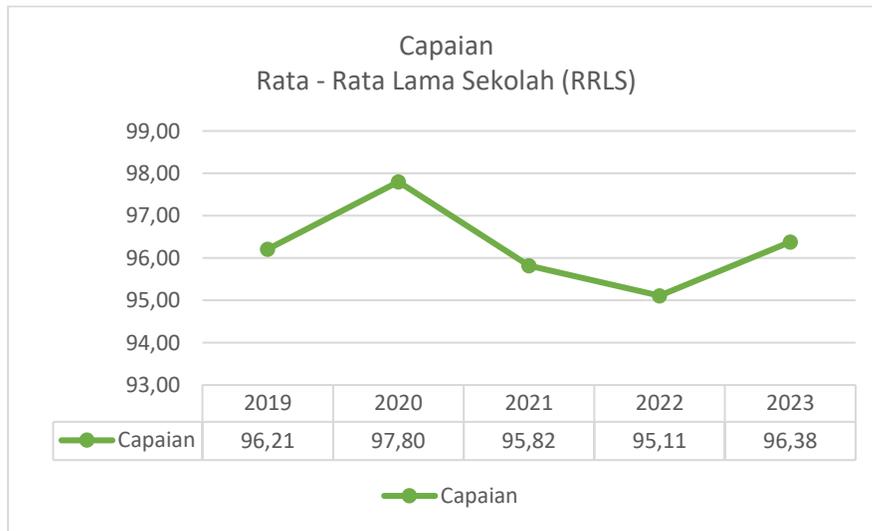


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian indikator pada HLS dan RRLS pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut

Grafik 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
HLS dan RRLS Tahun 2019 - 2023





Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.7 Sasaran 7 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Sasaran 7 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” adalah sebesar 7.65 dari target sebesar 8.3 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108.50 dan capaian kinerjanya tercapai.

Tercapainya target kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dipengaruhi faktor sebagai berikut :

- a. Mulai pulihnya kondisi ekonomi khususnya di sektor industri;
- b. Mulai pulihnya sektor industri berdampak pada proses peningkatan hasil industri sehingga kebutuhan industri akan tenaga kerja juga meningkat;
- c. Koordinasi dan upaya dari lintas sektor terhadap penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup baik.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi tingkat pengangguran ini adalah:

- a. Memperluas lapangan kerja, dengan menciptakan wirausaha-wirausaha baru;
- b. Sosialisasi dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait kebutuhan pegawai dan optimalisasi lowongan kerja;
- c. Memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada para pencari kerja yang mengarah pada penyerapan tenaga kerja;
- d. Adanya keterpaduan program dan kegiatan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja secara lintas sektor dalam penanganan pengangguran.

Gambar 3.10

Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

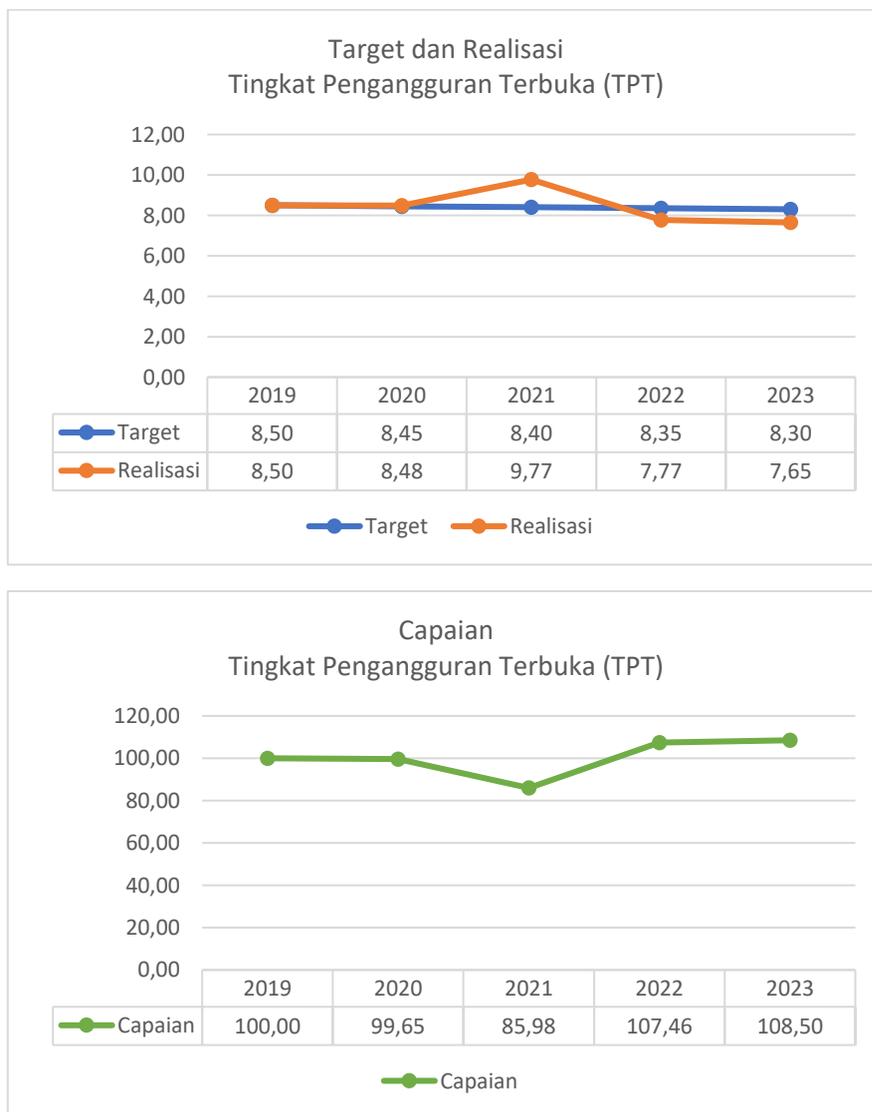


Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Tingkat Penganggura Terbuka pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.23

**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 - 2023**



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.8 Sasaran 8 (Meningkatnya Pertanian yang Mandiri Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan)

Sasaran 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Jumlah Produksi Padi, diukur berdasarkan jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan petani selama satu kali musim tanam dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) yang di ukur dalam satuan ton.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari jumlah produksi padi dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.24

Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Jumlah Produksi Padi**” adalah sebesar 1.154.800 Ton dari target sebesar 1.320.777 Ton yang direncanakan, sehingga capaian kinerja tidak tercapai dengan persentase capaian kinerjanya 87.43%.

Ketidaktercapaian produksi padi tahun 2023 disebabkan karena fenomena alam berupa banjir dan fenomena El Nino. Berdasarkan Laporan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah II menunjukkan bahwa curah yang terjadi pada bulan Januari – Maret tahun 2023 telah menyebabkan 3.522 hektar lahan sawah terendam air. Ada 330 hektar sawah yang mengalami gagal panen (fuso) dan 3.192 hektar tanaman padi bisa kembali pulih tumbuh akan tetapi dengan produktivitas yang menurun. Adapun fenomena El Nino dengan indikator naiknya suhu dan penurunan curah hujan telah menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, sehingga suplai air untuk pertanian juga menjadi berkurang. Tanaman padi sawah membutuhkan kekeringan yang disebabkan El Nino dapat mengurangi kesediaan air dan menyebabkan kegagalan panen serta penurunan produksi. Fenomena El Nino terjadi dimulai dari Mei 2023 hingga saat ini telah menyebabkan 2.082 hektar sawah mengalami kekeringan dan 390 hektar diantaranya gagal panen. Berikut ini sebaran luas sawah yang terkena banjir dan kekeringan di Kabupaten Subang Tahun 2023.

Tabel 3.8
Luas Lahan Sawah Terdampak Banjir dan El Nino
Kabupaten Subang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Terkena (Ha)			Fuso (Ha)			Penanganan (Ha)		
		Banjir	Kering	Juml	Banjir	Kering	Juml	Banjir	Kering	Juml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sagalaherang	0	4	4	0	0	0	0	4	4
2	Serangpanjang	0	4	4	0	0	0	0	4	4
3	Cibogo	0	10	10	0	0	0	0	10	10
4	Kalijati	6	0	6	0	0	0	6	0	6
5	Dawuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cipeundeuy	15	0	15	0	0	0	15	0	15
7	Pabuaran	440	400	840	0	0	0	440	400	840
8	Patokbeusi	150	140	290	0	25	25	150	115	265
9	Purwadadi	95	10	105	0	0	0	95	10	105
10	Cikaum	130	85	215	70	0	70	60	85	145
11	Pagaden	0	17	17	0	0	0	0	17	17
12	Pagaden Barat	38	0	38	0	0	0	38	0	38
13	Cipunagara	3	440	443	0	180	180	3	260	263
14	Compreng	10	0	10	0	0	0	10	0	10
15	Binong	110	0	110	0	0	0	110	0	110
16	Tambakdahan	10	0	10	0	0	0	10	0	10
17	Ciasem	525	310	835	192	80	272	333	230	563
18	Pamanukan	573	0	573	0	0	0	573	0	573
19	Sukasari	356	72	428	0	0	0	356	72	428
20	Pusakanagara	127	155	282	68	0	68	59	155	214
21	Pusakajaya	179	162	341	0	0	0	179	162	341
22	Legonkulon	190	48	238	0	0	0	190	48	238
23	Blanakan	565	225	790	0	105	105	565	120	685
Jumlah		3.522	2.082	5.604	330	390	720	3.192	1.692	4.884

*Sumber : Laporan Balai Perlindungan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Wilayah II*

Fenomena El Nino selain menyebabkan kekeringan juga meningkatkan serangan hama dan penyakit tanaman. Organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyerang tanaman padi sawah di Kabupaten Subang terdiri dari penggerek batang padi (PBP), wereng batang coklat (WBC), tikus, blas, hawar daun bakteri/keresek atau BLB (bacterial leaf blight), tungro, hama putih palsu. Adapun luas areal sawah yang terkena serangan OPT pada tahun 2023 mencapai 4.400 hektar dengan serangan tertinggi terjadi pada penggerek batang padi (PBP) mencapai 2.475 hektar diikuti dengan serangan tikus, BLB,

blas dan WBC masing-masing sebesar 978 Ha, 431 Ha, 251 Ha dan 116 Ha. Serangan hama dan penyakit tanaman ini tidak sampai menyebabkan fuso/gagal panen akan tetapi telah menurunkan kualitas gabah, produktivitas serta produkvtas serta produksi secara signifikan.

Gambar 3.11

Penanaman Padi Program Tanam Perdana

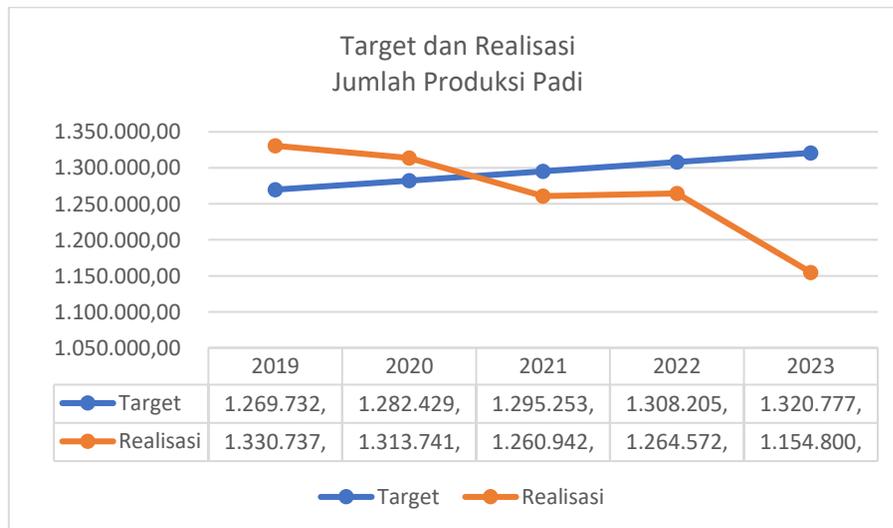


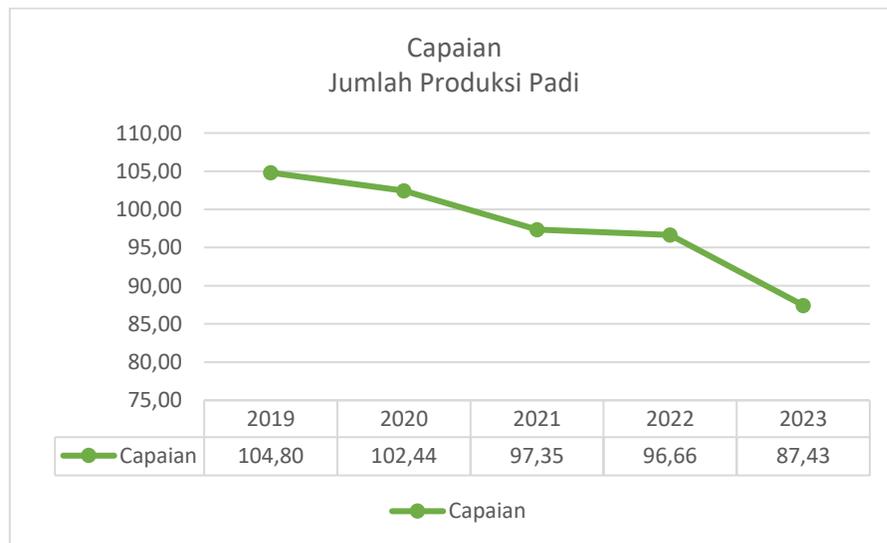
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Jumlah Produksi Padi Kabupaten Subang tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.25

Perbandingan Capaian Jumlah Produksi Padi Tahun 2019 - 2023





Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian indikator Jumlah Produksi Padi Kabupaten Subang tahun 2023 dengan standar nasional dapat dibandingkan dengan jumlah produksi padi di kabupaten/kota di setiap provinsinya.

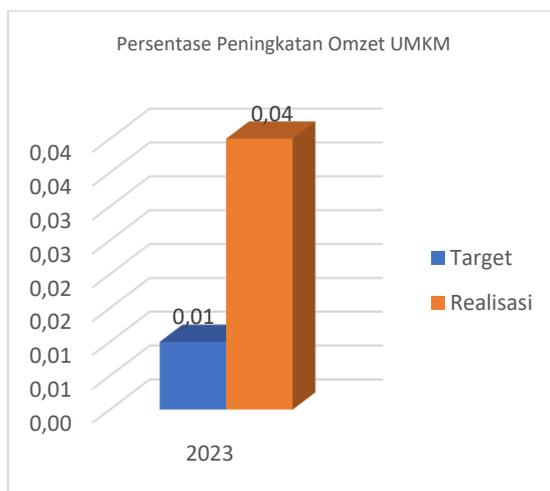
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah produksi padi Kabupaten Subang tahun 2023 berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.

3.1.9 Sasaran 9 (Meningkatnya Peran Industri Kreatif dan Perdagangan Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi)

Sasaran 9 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Persentase Peningkatan Omzet UMKM.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari indikator Persentase Peningkatan Omzet UMKM dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.26

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2023

Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator **“Persentase Peningkatan Omzet UMKM”** adalah sebesar 0,04 dari target sebesar 0,01 yang direncanakan, sehingga capaian kinerja tercapai dengan persentase capaian kinerjanya 400%.

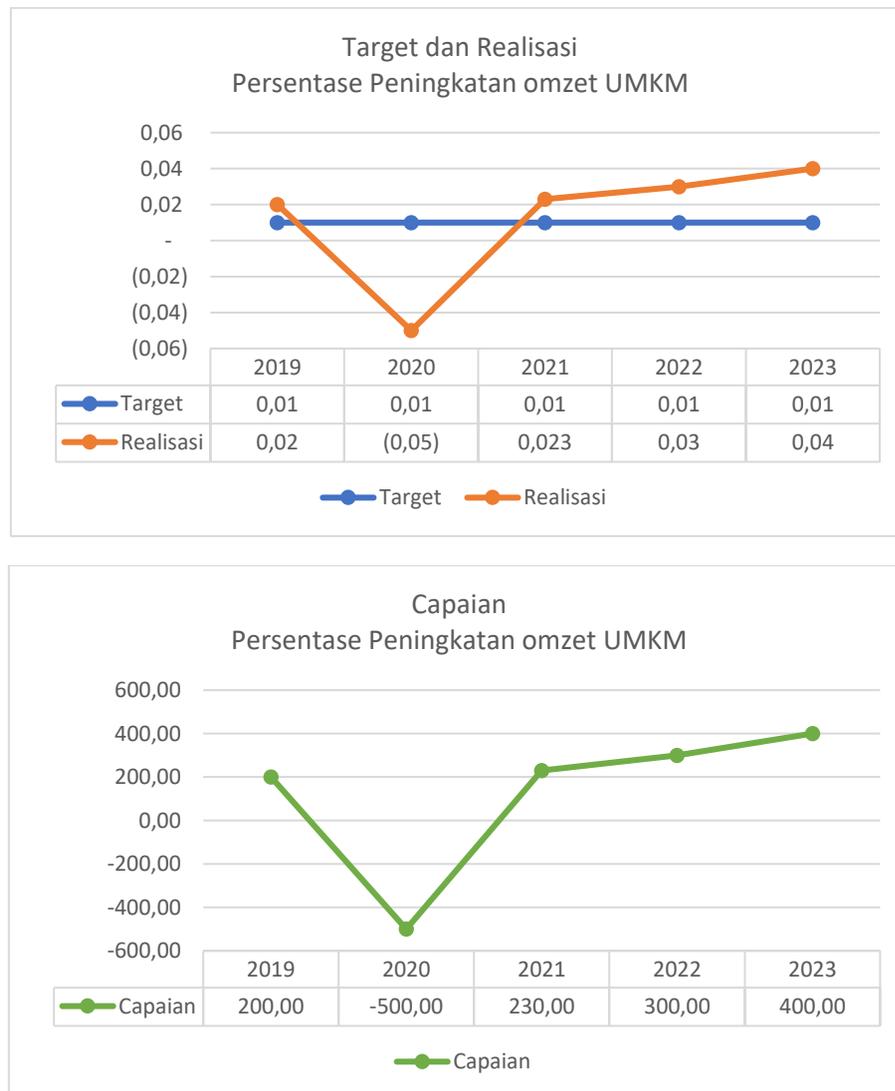
Peningkatan omzet UMKM tahun 2023 dikarenakan adanya anggaran tambahan dari Musrembang untuk pelaksanaan pelatihan UMKM dan dana hibah yang tidak ikut terkena refocussing. Selain itu para pelaku UMKM online, banyaknya permintaan produk UMKM di destinasi wisata, adanya desa wisata di Kabupaten Subang serta rest area di sekitar daerah wisata sehingga meningkatkan pemasaran produk - produk UMKM.

Gambar 3.12
Pemasaran Produk-Produk UMKM

Sumber : DKUPP Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Persentase Peningkatan Omzet UMKM pada tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan Omzet UMKM Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.10 Sasaran 10 (Meningkatnya Investasi)

Sasaran 10 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yakni :

1. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan nilai/bentuk penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap penanam modal dalam negeri dengan memakai modal dalam negeri.

Adapun target dan realisasi tahun 2023 dari indikator Nilai Investasi PMDN dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Investasi PMDN Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

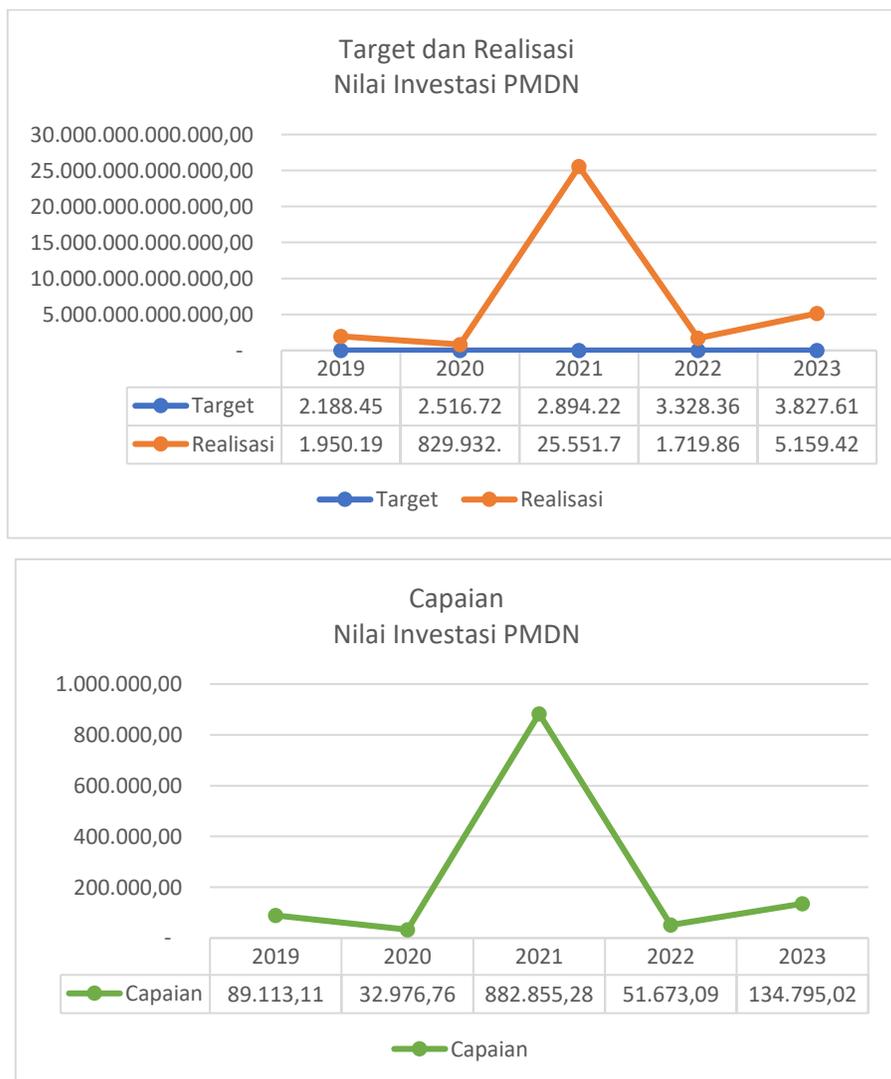
Realisasi Indikator “**Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri**” adalah sebesar Rp. 5.159.427.800.000 dari target sebesar Rp. 3.827.610.000 yang direncanakan, sehingga capaian kinerjanya tercapai dengan persentase capaian 134.795,02%.

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

DPMPTSP melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan realisasi investasi, mengikuti pameran untuk menyampaikan potensi-potensi kita Kabupaten Subang, agar minat investasi meningkat maka diharapkan realisasi nilai investasi juga ikut meningkat. Tak hanya itu, DPMPTSP terus meningkatkan sumber daya manusia terhadap para pegawai yang bertugas di DPMPTSP tersebut secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan. DPMPTSP Kabupaten Subang juga tidak pernah berhenti memberikan pembekalan untuk peningkatan sumber daya manusia yang bertugas, berkesinambungan sesuai dengan harapan dan apa yang dibutuhkan bisa terpenuhi.

Adapun perbandingan capaian Nilai Investasi PMDN tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Nilai Investasi PMDN Tahun 2019-2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

2. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk penanaman modal dengan mengembangkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.

Grafik 3.30

Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Investasi PMA Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Nilai Investasi Penanaman Modal Asing**” adalah sebesar Rp. 953.925.694.598 dari target sebesar Rp. 10.941.800.000 yang direncanakan, sehingga capaian kinerja tercapai dengan persentase capaian kinerjanya 8.718,18%.

Penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten subang. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) sangat diharapkan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Total nilai investasi penanaman modal asing (PMA) terus menguat terutama di sektor industry, dan sangat terkait dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah atas sistem perizinan melalui Online Single Submission.

Nilai investasi PMA selama kurun waktu 2020 – 2023 ada yang mengalami peningkatan ada juga penurunan di tahun 2023, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor diseluruh dunia, pun juga pada tahun 2023 disebabkan oleh

kurangnya kesadaran para pelaku penanam modal asing untuk melaporkan nilai investasinya.

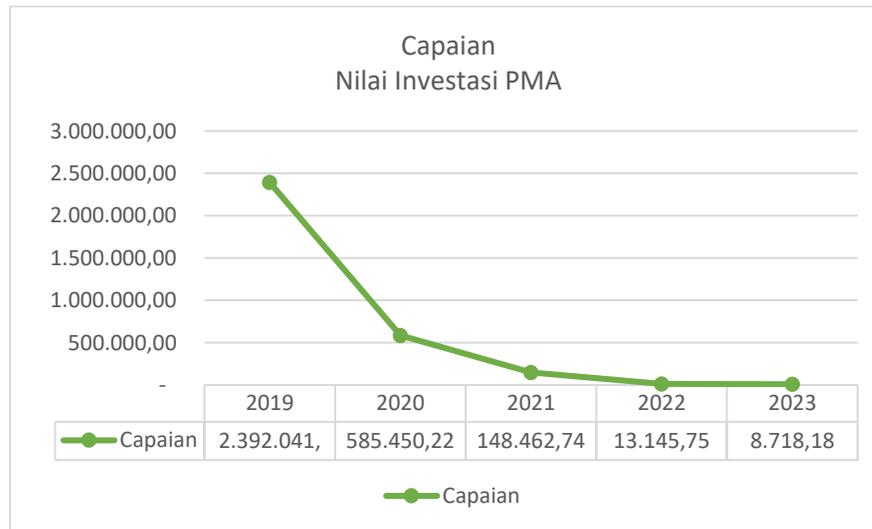
Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan investasi yaitu :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi investor PMDN dan Investor PMA dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Adapun perbandingan capaian Nilai Investasi PMA Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Nilai Investasi PMATahun 2019-2023





Sumber : Data Olahan Bag. Organisasi Setda Kab. Subang 2023

3.1.11 Sasaran 11 (Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan)

Sasaran 11 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Persentase Penduduk Miskin, diukur dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Adapun realisasi atas target indikator Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.32

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Persentase Penduduk Miskin**” adalah sebesar 9.52 dari target sebesar 9.54 yang direncanakan, sehingga capaian kinerja tercapai dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100.21%.

Untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun yang dimaksud dengan konsep garis kemiskinan adalah :

- a. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- c. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Gambar 3.13

Pemberian Bantuan Kepada Penduduk Miskin



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Subang 2023

Adapun perbandingan capaian indikator Persentase Penduduk Miskin tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 3.33

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2019 - 2023



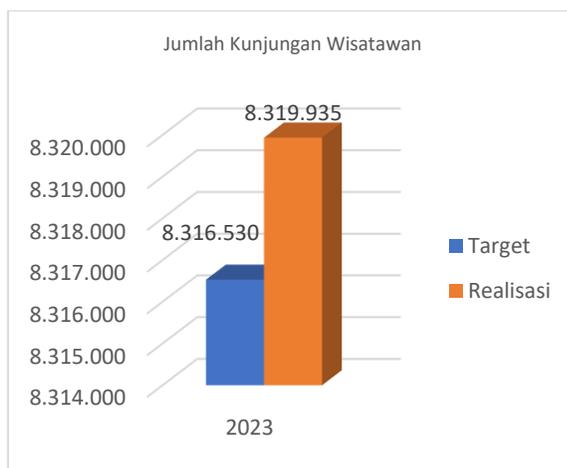
Sumber : Data Olahan Bag. Organisasi Setda Kab. Subang 2023

3.1.12 Sasaran 12 (Meningkatnya Pariwisata yang Berdaya Saing)

Sasaran 12 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Jumlah Kunjungan Wisatawan, diukur dari banyaknya orang yang melakukan kegiatan atau kunjungan wisata.

Adapun realisasi atas target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator
Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator “**Jumlah Kunjungan Wisatawan**” adalah sebesar 8.319.935 dari target sebesar 8.316.530 yang direncanakan, sehingga capaian kinerja tercapai dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100.04%.

Pariwisata merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini karena investasi yang dilakukan untuk pengembangan wisata biasanya hanya sekali dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan peralatan, sedangkan penggunaan atau pemanfaatan bisa berulang-ulang. Hal ini akan lebih maksimal jika didukung oleh obyek yang menarik, kemudahan akses dan promosi yang baik. Potensi dasar yang ada di sektor pariwisata Kabupaten Subang sangat besar pengaruhnya terhadap sumber PAD.

Potensi tersebut adalah potensi fisik dan potensi Sosial-Budaya. Potensi fisik diantaranya yaitu kondisi alam dan letak geografis Kabupaten Subang yang strategis dan didukung dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

Potensi sosial–budaya meliputi adat istiadat, kesenian, bangunan peninggalan sejarah, tempat ibadah, serta berbagai makanan yang khas. Akan mengundang para investor maupun wisatawan dari seluruh Indonesia maupun penjuru dunia.

Berikut beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan sebagai berikut :

- a. Adanya pengembangan destinasi daya tarik wisata di beberapa desa wisata;
- b. Adanya aplikasi Jawara Wisata;
- c. Adanya pelatihan dan pembinaan SDM kepariwisataan.

Gambar 3.14

Meningkatnya Wisatawan Pariwisata di Kabupaten Subang Tahun 2023



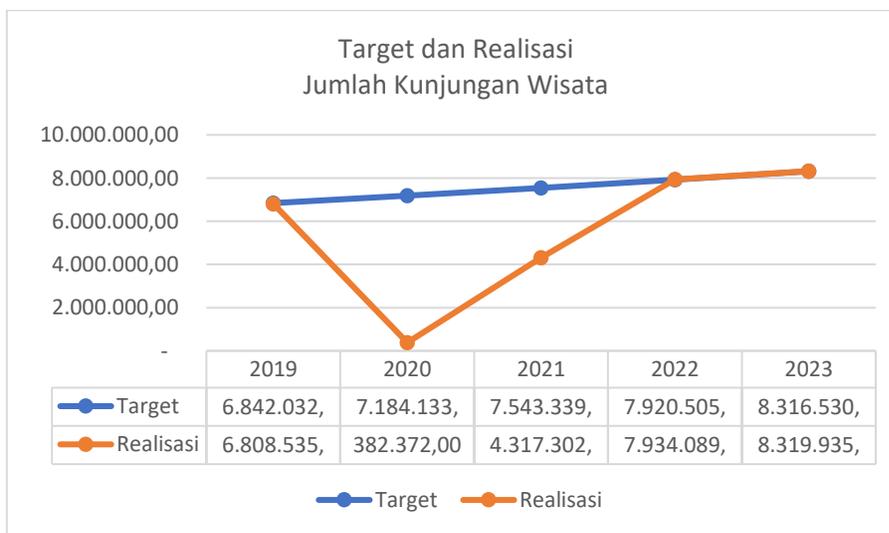
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.35

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator

Jumlah Kinjungan Wisatawaan Tahun 2019 - 2023





Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.13 Sasaran 13 (Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat)

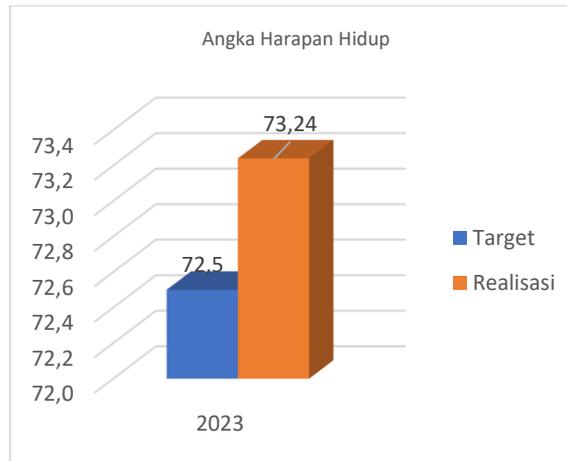
Sasaran 13 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Angka Harapan Hidup (AHH), adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-X. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup dijadikan Indikator Sasaran arena AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Adapun realisasi atas target indikator Angka Harapan Hidup tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.36

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2023**



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “**Angka Harapan Hidup (AHH)**” adalah sebesar 73.24 dari target sebesar 72.5 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.02 dan capaian kinerjanya tercapai. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Salah satu faktor pendorong tercapainya Angka Harapan Hidup dari bidang kesehatan yaitu meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Subang.

Gambar 3.15

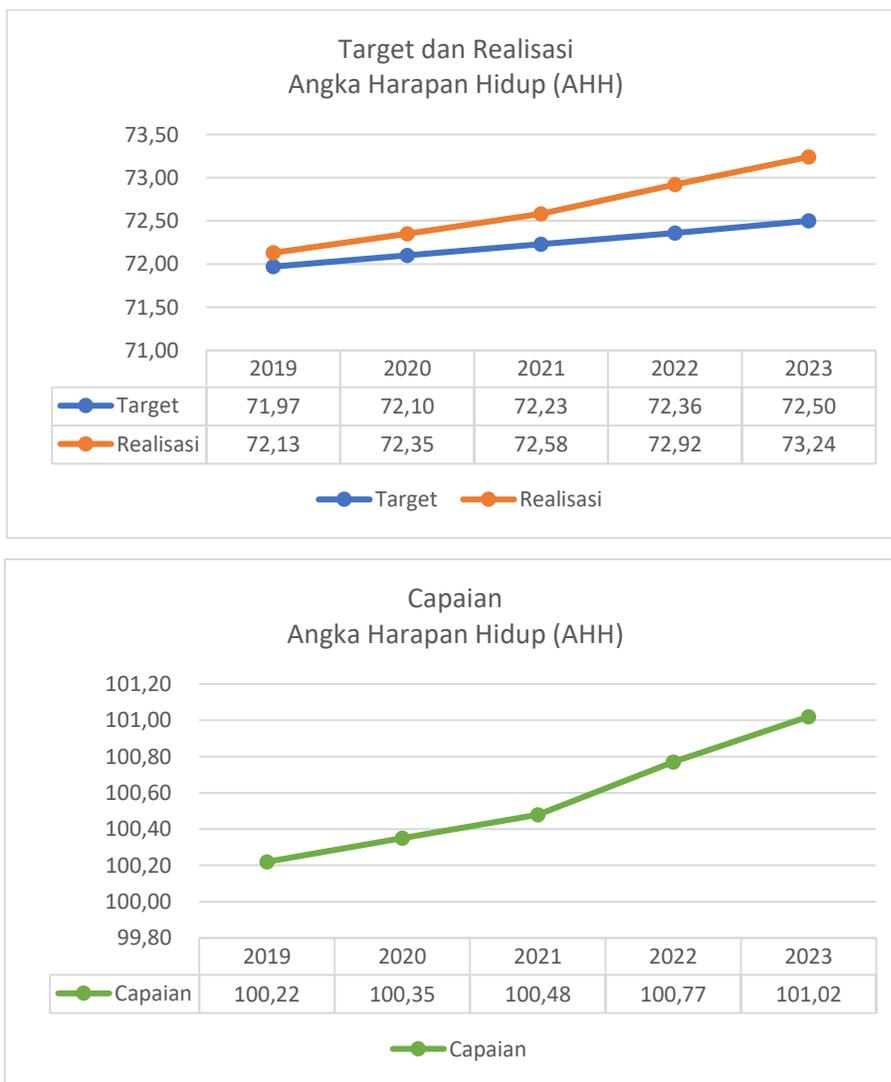
Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.37
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Angka Harapan Hidup Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.14 Sasaran 14 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)

Sasaran 14 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), digunakan menjadi salah satu indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, karena indikator IKLH ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu

Adapun realisasi atas target indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.38

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**” adalah sebesar 60.47 dari target sebesar 58 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104.26 dan capaian kinerjanya tercapai.

Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Indeks Kualitas Air

Sumber daya air yang meliputi air permukaan dan air tanah selalu mengalami dua permasalahan utama, yakni rendahnya kuantitas dan kualitas. Peningkatan kebutuhan hidup serta perkembangan wilayah yang disertai dengan berdirinya kawasan-kawasan industri baru, semakin menambah intensitas dan kompleksitas dari permasalahan sumber daya air. Kualitas air sungai (tingkat pencemaran sungai) di sisi lain dipengaruhi berbagai macam faktor, seperti aktivitas sosial ekonomi yang terdapat di sepanjang aliran sungai, termasuk perbedaan fungsi dan pemanfaatan sungai serta kondisi wilayah yang dilaluinya. Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya peternakan, dan segala aktivitasnya juga dapat mengakibatkan potensi tingkat pencemaran semakin bertambah.

Pengambilan sampel kualitas air sungai tahun 2023 dilakukan di Sungai Cilamaya, Sungai Cipunagara dan Sungai Ciasem dilakukan di 9 titik

selama 3 kali Periode Pemantauan (Maret, Juli dan Agustus) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) DAS Cilamaya sebanyak 3 Titik selama 3 Periode Pemantauan;
- 2) DAS Ciasem sebanyak 3 Titik selama 3 Periode Pemantauan;
- 3) DAS Cipungara sebanyak 3 Titik selama 3 Periode Pemantauan.

Berikut perhitungan IKA Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 di DAS Cilamaya, DAS Cipunagara, dan DAS Ciasem dengan anggaran APBD didapatkan 49,26 dengan kualifikasi Kurang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perhitungan IKA Kabupaten Subang Tahun 2023
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 27 Tahun 2021

Mutu Air	Jumlah pemantauan yang memenuhi mutu air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per Mutu Air
Memenuhi	0	0%	70	0,00
Cemar Ringan	26	96%	50	48,15
Cemar Sedang	1	4%	30	1,11
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
Total	27	100.00	IKA =	49,26

Sumber : Laporan Pengawasan Air 2023

Berikut penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Indeks Kualitas Air dan alternatif solusi yang telah dilakukan :

- 1) Faktor Penghambat
 - a) Diperlukan adanya penambahan titik untuk masing-masing DAS Cilamaya, Cipunagara dan Ciasem, serta Penambahan Periode Pemantauan;
 - b) Kurangnya kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan nilai indeks kualitas air;
 - c) Tidak adanya regulasi untuk pengendalian pencemaran air di Kabupaten Subang;
 - d) Pencemaran air sungai yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia menyebabkan rendahnya kualitas air sungai.
- 2) Upaya yang dilakukan :

- a) Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup;
 - b) Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
 - c) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk Masyarakat;
 - d) Meningkatkan pelibatan Masyarakat, usaha dan atau kegiatan, serta Lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- 3) Solusi :
- a) Meningkatkan kualitas air sungai dan kondisi ekologis melalui pemantauan di sungai, kali serta situ;
 - b) Penegakkan hukum lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau menghentikan pencemaran/perusakan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup;
 - c) Melakukan pembinaan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Sekolah Adhiwiyata, Kampung Iklim dan Saka Kalpataru.

Gambar 3.16

Pengawasan Kualitas Air



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang 2023

- b. Indeks Kualitas Udara
- Kualitas udara ambien merupakan tahap awal untuk memahami dampak negatif cemaran udara terhadap lingkungan. Kualitas udara ambien ditentukan oleh kuantitas emisi cemaran dari sumber cemara dan proses transportasi, konversi dan penghilangan cemaran di atmosfer.

Kualitas udara ambien akan menentukan dampak negatif cemaran udara terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (tumbuhan, hewan, material dan lain-lainnya). Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Untuk melakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara, data diperoleh dari pengambilan sampel NO₂ dan SO₂ dengan Passive Sampler dirata-ratakan untuk tiap kota.

1) Faktor Penghambat

- a) Pada tahun 2022 serta tahun 2023 aktivitas mobilisasi mulai menuju tingkat yang stabil dan normal, hal ini terlihat dengan meningkatnya nilai konsentrasi SO₂ dan NO₂ pada area industri;
- b) Kurangnya kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan nilai indeks kualitas udara;
- c) Tidak adanya regulasi untuk pengendalian kualitas udara di Kabupaten Subang;
- d) Pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai aktivitas industri serta aktivitas manusia.

2) Upaya yang dilakukan

- a) Memperbanyak titik sampel pemantauan kualitas udara di Wilayah Subang Utara, Tengah dan Selatan dengan pertimbangan kondisi lingkungan Kabupaten Subang yang semakin dinamis dan agar bisa mewakili kondisi IKU Kabupaten Subang secara keseluruhan;
- b) Pengawasan yang ketat terhadap industri yang menghasilkan emisi, baik emisi sumber tidak bergerak ataupun emisi bergerak;
- c) Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan antara lain dengan tidak melakukan pembakaran sampah;

- d) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar meningkatkan kualitas oksigen dan mengurangi konsentrasi pencemar yang ada di udara terbuka.
- 3) Solusi
- a) Membuat peraturan perundang-undangan (Perbup) yang berkaitan dengan pengendalian kualitas udara di Kabupaten Subang;
 - b) Berupaya untuk mewujudkan kinerja yang saling berintegrasi antar elemen
 - c) pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dan beralih kedalam transportasi umum
 - d) Pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala
 - e) Mendukung penggunaan energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil

Gambar 3.17

Pemantauan Kualitas Udara



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang 2023

- c. Indeks Kualitas Lahan
- Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Nilai indeks didapatkan dengan formula:
- Dimana:
- ITH = Indeks Tutupan Hutan
- LTH = Luas Tutupan ber-Hutan
- LWP = Luas Wilayah Provinsi

Perbandingan Target dan Realisasi IKTL Tahun 2023

Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
50	33,53	67,06 %	Tidak Tercapai

Berikut penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Indeks Kualitas Udara selama dan alternatif solusi yang telah dilakukan:

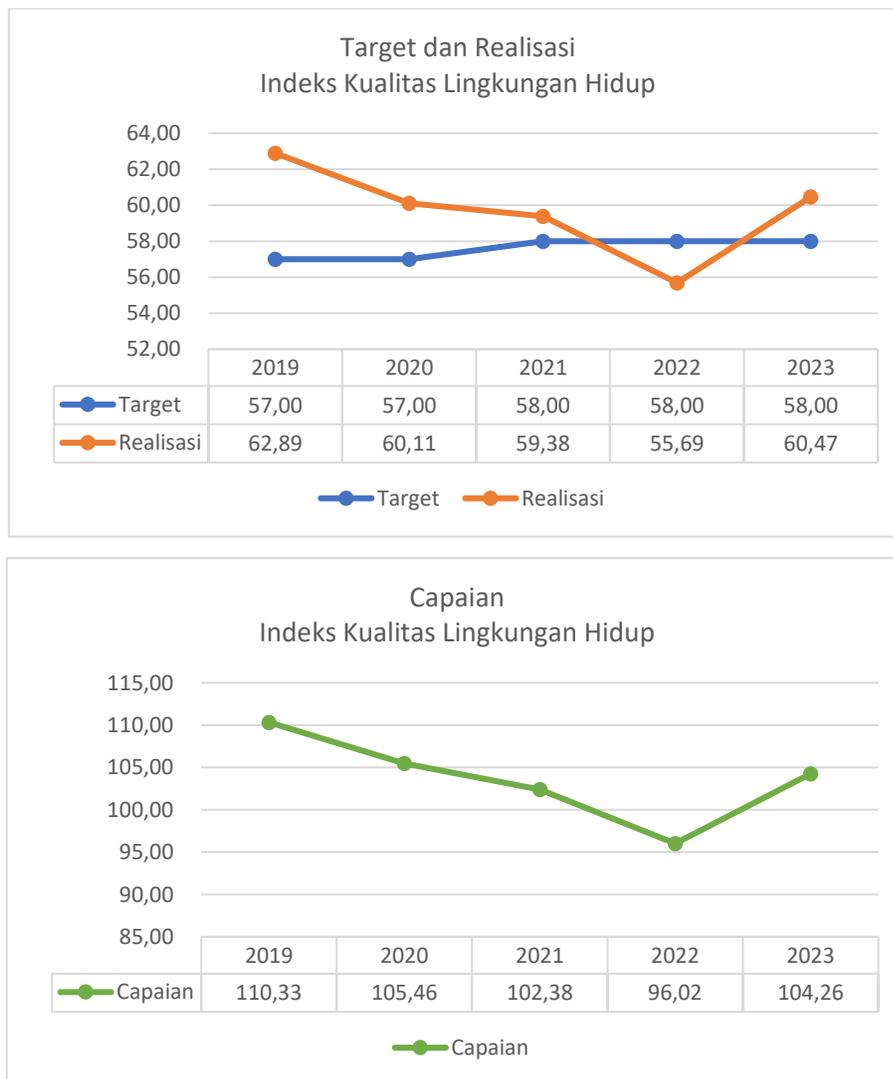
- 1) Faktor Penghambat
 - a) Alih fungsi Lahan
 - b) Ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas
- 2) Upaya yang dilakukan
 - a) Memperbanyak/memperluas ruang terbuka hijau
 - b) Penanaman Pohon Kembali
 - c) Penanaman mangrove di daerah pesisir pantai
 - d) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan

Gambar 3.18**Pemanfaatan Kualitas Lahan**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.39
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
IKLH Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.1.15 Sasaran 15 (Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana)

Sasaran 15 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama yakni Indeks Resiko Bencana, merupakan indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah.

Adapun realisasi atas target indikator Angka Harapan Hidup tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.40
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Resiko Bencana Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Realisas Indikator Kinerja Utama “**Indeks Resiko Bencana (IRB)**” adalah sebesar 143.43 dari target sebesar 162 yang direncanakan, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112.95 dan capaian kinerjanya tercapai. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana tersebut menjadi tolak ukur kinerja utama di Kabupaten Subang, yaitu indeks resiko bencana. Untuk mencapai sasaran peningkatan indeks ketahanan daerah pada periode lima tahun 2018-2023, sebagai kelanjutan/pengembangan dari periode lima tahun sebelumnya, terarah pada pengembangan dan penguatan faktor-faktor: komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan.

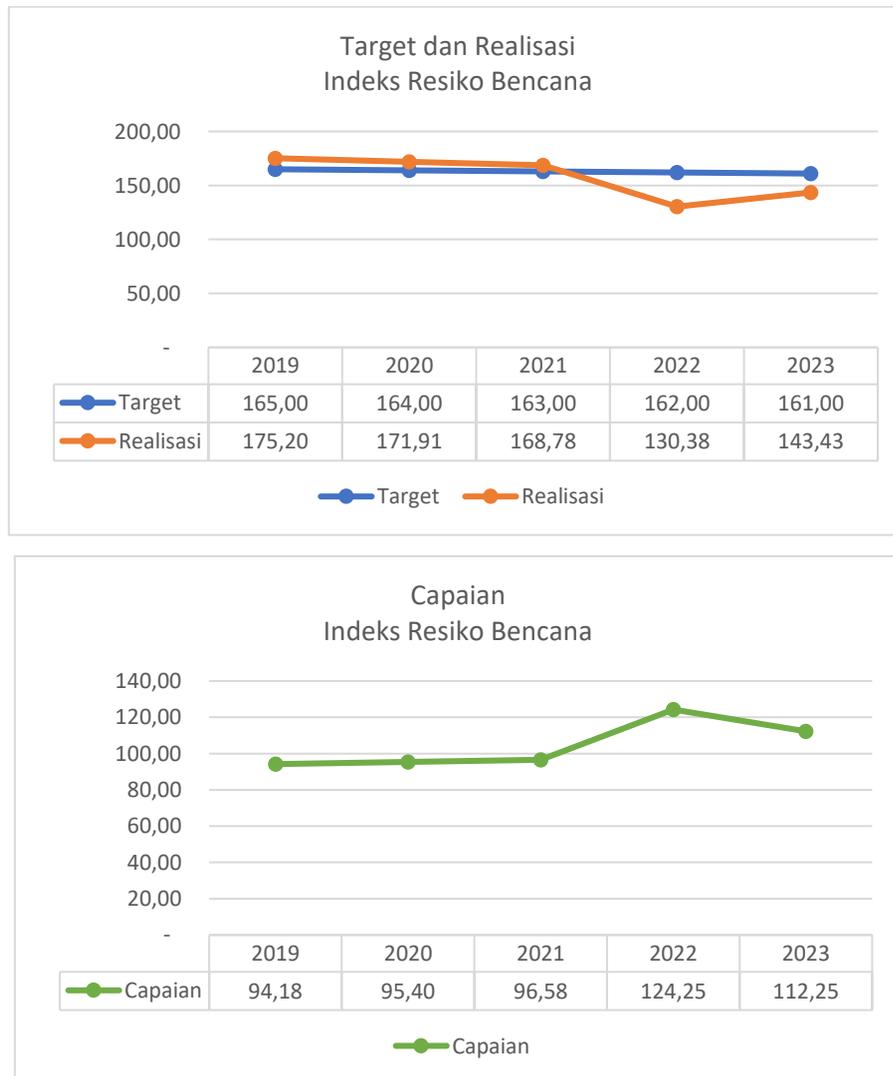
Gambar 3.16
Penanganan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Subang Tahun 2023



Sumber : BPBD Kab. Subang 2023

Adapun perbandingan capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.41
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator
Indeks Resiko Bencana Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang yang telah mengalami beberapa kali perubahan parsial. Total anggaran pada saat penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan 2023 di bulan November 2023 yaitu Rp. 3.333.358.370.334,- dan mengalami perubahan parsial kembali menjelang akhir tahun 2023 dengan penambahan sebesar Rp. 26.338.605.674,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 3.359.696.976.008,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.224.405.752.327,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,97%.

Adapun realisasi anggaran dan efisiensi pada tahun 2023 dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Rincian Program dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.742.288.836.432	1.698.632.291.631	97,49	2,51
2	Program Pengelolaan Pendidikan	339.427.989.107	337.230.962.648	99,35	0,65
3	Program Pengembangan Kurikulum	29.900.000	29.900.000	100,00	0,00
4	Program Pengembangan Kebudayaan	896.500.000	891.312.000	99,42	0,58
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	55.000.000	55.000.000	100,00	0,00
6	Program Pembinaan Sejarah	201.500.000	200.828.250	99,67	0,33
7	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	205.000.000	204.084.100	99,55	0,45
8	Program Pengelolaan Permuseuman	700.000.000	698.504.475	99,79	0,21
9	Program Pengelolaan SDA	41.378.105.365	40.472.003.480	97,81	2,19
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.706.246.819	9.398.616.560	96,83	3,17
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	31.325.010	21.570.000	68,86	31,14
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	22.716.908.191	22.428.461.985	98,73	1,27
13	Program Penataan Bangunan Gedung	7.745.446.270	7.605.413.795	98,19	1,81



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2.176.503.020	2.114.586.960	97,16	2,84
15	Program Penyelenggaraan Jalan	119.043.579.667	113.494.062.705	95,34	4,66
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.458.705.000	2.093.668.000	85,15	14,85
17	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	289.359.500	286.275.791	98,93	1,07
18	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	947.120.000	947.120.000	100,00	0,00
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	811.016.000	750.014.683	92,48	7,52
20	Program Pengembangan UMKM	766.280.000	707.691.750	92,35	7,65
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000	50.000.000	100,00	0,00
22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	52.215.750	52.215.750	100,00	0,00
23	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	20.000.000	19.675.000	98,38	1,63
24	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	268.796.600	0	0,00	100,00
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.163.431.000	1.065.228.290	91,56	8,44
26	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	38.691.396.500	33.259.108.333	85,96	14,04
27	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	255.970.000	253.649.000	99,09	0,91
28	Program Penyuluh Pertanian	897.588.000	840.740.800	93,67	6,33
29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.271.300.000	1.256.776.200	98,86	1,14
30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.898.564.750	7.826.641.032	99,09	0,91
31	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	602.300.000	601.470.000	99,86	0,14
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	275.100.000	273.668.800	99,48	0,52
33	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.600.000	349.130.240	99,58	0,42
34	Program Pemberdayaan Sosial	1.659.702.000	1.480.013.100	89,17	10,83
35	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.250.000	10.250.000	100,00	0,00
36	Program Rehabilitasi Sosial	1.572.924.000	1.513.854.000	96,24	3,76
37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.837.055.000	2.672.570.000	94,20	5,80
38	Program Penanganan Bencana	874.381.200	873.459.500	99,89	0,11



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
39	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	78.026.700	78.026.700	100,00	0,00
40	Program Kawasan Permukiman	1.565.921.500	1.116.512.500	71,30	28,70
41	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	26.574.200.000	26.255.144.000	98,80	1,20
42	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.797.811.900	5.307.181.920	91,54	8,46
43	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.205.482.000	2.173.918.200	98,57	1,43
44	Program Penanggulangan Bencana	2.596.167.500	2.540.604.893	97,86	2,14
45	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	840.262.710	832.734.588	99,10	0,90
46	Program Penempatan Tenaga Kerja	83.864.000	83.864.000	100,00	0,00
47	Program Hubungan Industrial	60.460.000	54.460.000	90,08	9,92
48	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	22.547.500	22.547.500	100,00	0,00
49	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	21.908.400	21.908.400	100,00	0,00
50	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	292.125.000	292.125.000	100,00	0,00
51	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	401.290.000	399.040.000	99,44	0,56
52	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	29.672.795.300	29.431.851.950	99,19	0,81
53	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	622.317.349	460.090.000	73,93	26,07
54	Program Pemasaran Pariwisata	86.460.000	85.363.000	98,73	1,27
55	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	280.268.250	275.260.250	98,21	1,79
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.588.545.895	103.693.011.917	79,40	20,60
57	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	389.245.000	364.710.000	93,70	6,30
58	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.009.019.000	1.048.338.830	34,84	65,16
59	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.311.269.500	862.493.050	37,32	62,68



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
60	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	101.750.000	98.750.000	97,05	2,95
61	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	162.955.000	146.822.500	90,10	9,90
62	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.064.474.622	1.997.299.758	96,75	3,25
63	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.600.000	1.600.000	100,00	0,00
64	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	48.275.000	21.000.000	43,50	56,50
65	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45.045.000	44.142.500	98,00	2,00
66	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	41.875.000	40.975.000	97,85	2,15
67	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	64.995.000	63.245.000	97,31	2,69
68	Program Pengelolaan Persampahan	13.686.145.400	12.987.006.142	94,89	5,11
69	Program Pendaftaran Penduduk	19.570.000	17.570.000	89,78	10,22
70	Program Pencatatan Sipil	18.750.000	5.980.000	31,89	68,11
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.750.000	19.460.000	89,47	10,53
72	Program Penataan Desa	20.500.000	17.600.000	85,85	14,15
73	Program Peningkatan Kerjasama Desa	20.500.000	20.410.000	99,56	0,44
74	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.903.158.750	3.813.820.254	77,78	22,22
75	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.925.723.250	1.906.899.230	99,02	0,98
76	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	681.400.000	604.195.200	88,67	11,33
77	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	374.400.000	374.340.000	99,98	0,02
78	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	42.450.000	41.040.000	96,68	3,32



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
79	Program Perlindungan Khusus Anak	53.300.000	51.896.364	97,37	2,63
80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.708.072.647	12.111.251.519	95,30	4,70
81	Program Pengendalian Penduduk	384.000.000	303.375.930	79,00	21,00
82	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	11.439.949.000	11.293.342.794	98,72	1,28
83	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	8.102.700.000	7.892.500.000	97,41	2,59
84	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	5.422.117.000	4.827.092.248	89,03	10,97
85	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	967.020.000	959.953.300	99,27	0,73
86	Program Aplikasi Informatika	2.823.797.000	2.767.890.200	98,02	1,98
87	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.005.000	74.005.000	100,00	0,00
88	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	393.780.000	369.695.450	93,88	6,12
89	Program Pembinaan Perpustakaan	10.329.739.500	9.961.626.000	96,44	3,56
90	Program Pengelolaan Arsip	220.167.150	207.004.625	94,02	5,98
91	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.843.106.000	1.765.420.300	95,79	4,21
92	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.004.802.500	5.638.906.025	93,91	6,09
93	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	437.775.000	431.373.000	98,54	1,46
94	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	6.155.000	6.155.000	100,00	0,00
95	Program Penatagunaan Tanah	240.240.000	229.010.000	95,33	4,67
96	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.610.478.500	2.551.506.420	97,74	2,26
97	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	43.366.961.250	42.764.662.750	98,61	1,39
98	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	10.093.159.000	8.026.721.374	79,53	20,47
99	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	707.041.000	612.255.950	86,59	13,41
100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	608.309.250	497.753.236	81,83	18,17



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (%)
101	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	135.335.000	129.211.640	95,48	4,52
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	610.958.247.538	578.461.615.935	94,68	5,32
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.700.485.000	1.517.021.463	89,21	10,79
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.598.510.171	12.922.930.795	95,03	4,97
105	Program Kepegawaian Daerah	2.601.569.000	2.528.170.500	97,18	2,82
106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.328.098.000	1.328.098.000	100,00	0,00
107	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.413.002.000	3.241.320.750	94,97	5,03
108	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	64.699.500	64.099.500	99,07	0,93
109	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	598.409.000	585.589.500	97,86	2,14
110	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.731.747.900	2.715.107.900	99,39	0,61
111	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.659.850.000	1.658.380.000	99,91	0,09
112	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	123.000.000	122.000.000	99,19	0,81
113	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	631.164.000	630.854.000	99,95	0,05
114	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.987.490.685	3.624.835.050	90,91	9,09
115	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.348.803.060	12.665.836.669	88,27	11,73
116	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	216.762.500	206.602.000	95,31	4,69
117	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	390.928.150	378.520.000	96,83	3,17
	Jumlah Anggaran	3.359.696.976.008	3.224.405.752.327	95,97	4,03

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 ini memuat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang atas kinerja yang diperjanjikan Bupati Subang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengidentifikasi berdasarkan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian 15 (lima belas) sasaran strategis melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap sarasannya menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

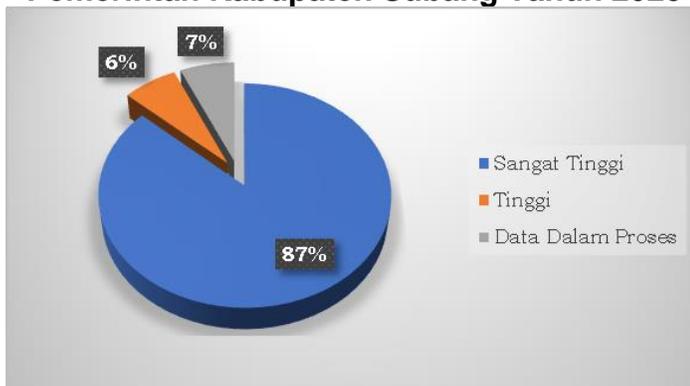
Capaian kinerja didapatkan dari hasil pengukuran kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hasil pengukuran pada 15 (lima belas) Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sasaran dengan kriteria penilaian sangat tinggi.
2. 1 (satu) sasaran dengan kriteria penilaian tinggi.
3. 1 (satu) sasaran masih dalam proses dikarenakan terdapat Indikator Kinerja Utama pada sasaran tersebut masih dalam penilaian, yakni indikator Opini BPK.

Pengukuran sasaran strategis didasarkan atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap sarasannya, sehingga rata-rata capaian sasaran strategis dapat disimpulkan melalui grafik berikut.

Grafik 4.1
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023



Sumber : Data Olahan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang 2023

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian terendah terdapat pada indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian kinerja 81,33%. Ketidackapaian kinerja pada indikator tersebut secara garis besar disebabkan karena belum optimalnya komitmen dalam manajemen kinerja. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP yaitu:

1. Memperkuat komitmen, baik dengan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maupun dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan provinsi maupun dengan kementerian;
3. Melaksanakan kaji banding terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat AA (sangat memuaskan) 6 tahun berturut-turut yakni Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

Langkah-langkah maupun strategi perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lainnya dengan melaksanakan evaluasi terhadap setiap IKU secara berkelanjutan untuk menjadi perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Tahun 2023, besar harapan kami bahwa LKIP Kabupaten Subang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUHIMAT**

Jabatan : Bupati Subang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Subang, 03 November 2023

BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Indek Reformasi Birokrasi	A
		2	Nilai Evaluasi AKIP	A (84.00)
		3	Opini BPK	WTP
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
3.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	5	Persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik	95%
		6	Persentase jembatan dalam kondisi baik	97%
		7	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	55%
4.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	8	Persentase ketersediaan rumah layak huni	74.49%
5.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	9	Indeks Desa Membangun	0,69
6.	Meningkatnya derajat pendidikan	10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.12 Tahun
		11	Rata Rata Lama Sekolah (RRLS)	7.73 Tahun
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8.30%
8.	Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	13	Jumlah Produksi Padi	1.320.777 Ton
9.	Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pembangunan ekonomi	14	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1%
10.	Meningkatnya investasi	15	Nilasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 3.827.610.000
		16	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 10.941.800.000
11.	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	9,54%
12.	Meningkatnya Pariwisata yang Berdaya Saing	18	Jumlah kunjungan wisatawan	8.316.530 Orang
13.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	19	Angka Harapan Hidup	72.50 Tahun

14.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58
15.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	21	Indeks Resiko Bencana	161

Program		Anggaran
1	Program Pendukung Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya di Kabupaten Subang	Rp. 2,564,901,035,543.00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 322,927,989,107.00
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 29,900,000.00
4	Program Pengelolaan SDA	Rp. 41,378,105,365.00
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 9,706,246,819.00
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 31,325,010.00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 22,716,908,191.00
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 7,745,446,270.00
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 2,176,503,020.00
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 119,223,951,667.00
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2,458,705,000.00
12	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 289,359,500.00
13	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 947,120,000.00
14	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 811,016,000.00
15	Program Pengembangan UMKM	Rp. 766,280,000.00
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2,434,731,000.00
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 46,589,961,250.00
20	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350,600,000.00
21	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 275,100,000.00
22	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1,874,730,000.00

Program		Anggaran
23 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	10,250,000.00
24 Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	1,572,924,000.00
25 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	2,837,055,000.00
26 Program Penanganan Bencana	Rp.	874,381,200.00
27 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	78,026,700.00
28 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	622,317,349.00
29 Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	86,460,000.00
30 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp.	280,268,250.00
31 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	128,354,540,221.00
32 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	389,245,000.00
33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	2,311,269,500.00
34 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	101,750,000.00
35 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	162,955,000.00
36 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	2,064,474,622.00
37 Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	2,610,478,500.00
38 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	43,366,961,250.00
	Rp.	3,333,358,370,334.00

Subang, November 2023

BUPATI SUBANG,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TANGGAL : 1 JULI 2019

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai yang diperoleh atas evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai yang diperoleh atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Penilaian Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai yang diperoleh atas hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	5.	Persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah ruas jalan kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Jalan dan Jembatan
		6.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Jalan dan Jembatan
		7.	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan}}{\text{Jumlah ruas jalan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Laporan Kinerja Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	8.	Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	9.	Indeks Desa Membangun	Nilai yang diperoleh atas hasil pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6.	Meningkatnya derajat pendidikan	10.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\text{Faktor koreksi pesantren} \times \sum_{I=Usia 7 \text{ tahun ke atas}} \frac{\text{Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk usia I pada tahun } t}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Subang Dalam Angka
		11.	Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	$\frac{\text{Jumlah penduduk} \times \text{lama pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang sedang bersekolah/telah berijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten Subang Dalam Angka

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
7.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	13.	Jumlah produksi padi	Jumlah produksi padi dalam satu tahun	Dinas Pertanian	Laporan Kinerja Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pembangunan ekonomi	14.	Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	$\frac{\text{Jumlah omzet tahun } n - \text{jumlah omzet tahun } n-1}{\text{Jumlah omzet tahun } n-1} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
10.	Meningkatnya investasi	15.	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		16.	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	17.	Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Badan Pusat Statistik
12.	Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	18.	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	19.	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehata	Badan Pusat Statistik
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang diperoleh dari penggabungan (komposit) atas hasil pengukuran tiga indikator, yaitu Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
15.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	21.	Indeks Resiko Bencana	Nilai yang diperoleh dari penggabungan (komposit) atas hasil pengukuran empat indikator, yaitu Indeks Ancaman, Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian, dan Indeks Kapasitas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat



 BUPATI SUBANG,



 RUHIMAT

**REKAP PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023**

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Tanggal Diberikan
1		Rapat Koordinasi Akbar Penyuluh POPT	13 Februari 2023
2		Anugerah IWO Indonesia untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	15 Februari 2023
3		5 Besar Daerah yang berhasil mengeliminasi Filariasis atau Penyakit Kaki Gajah	21 Februari 2023
4		Batas Desa Award Predikat "Sangat Baik" Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI	14 Maret 2023
5		Porprov XIV Jawa Barat Posisi ke 7 (171 Medali yang terdiri dari 58 emas, 42 medali perak, dan 171 medali perunggu)	3 April 2023
6		WTP Ke - 5 BPK RI	16 Mei 2023
7		Pemenuhan dan Pelaporan Pencapaian Indikator Kuesioner Kabupaten Peduli HAM dari Kemenkumham JABAR	3 Juli 2023

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Tanggal Diberikan
8		Heleran Karya Kreatif Jawa Barat	08 Juli 2023
9		Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama (Kemen PPA RI)	16 Agustus 2023
10		Kontribusi dalam Memfasilitasi Kegiatan Kepada WBP Lapas Kelas II A Subang dari Gubernur Jawa Barat	21 Agustus 2023
11		Universal Health Coverage 2023	04 Oktober 2023
12		Juara 1 Kategori Kabupaten - Kinerja Terbaik Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting - Aksi Stunting Award	28 November 2023
13		Swasti Saba Kemenkes RI	28 November 2023
14		Top 25 Inovasi KIJB Pemprov JABAR	04 Desember 2023

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Tanggal Diberikan
15		<p>Terbaik Tiga Kategori Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri Resilience and Sustainable Industry dari DITJEN Kementerian Perindustrian</p>	<p>11 Desember 2023</p>



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Darmodihardjo No.1 Telepon/Faksimile : (0260) 4242927
e-mail : inspektoratdaerah@subang.go.id Subang 41211

Subang, 28 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/LHR/LKIP/76/IRDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten
Subang Untuk Tahun 2023.

Yth. Pj. Bupati Subang
di
S u b a n g

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Subang telah melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Untuk Tahun Anggaran 2023. Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor 700.1.2.9/152/sekre/2024 Melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Tahun 2023, tanggal 19 Maret 2024.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Untuk Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret sampai dengan 21 Maret 2024 (3 Hari). Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Subang Untuk Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara paralel dengan waktu pelaksanaan penyusunan laporan Kinerja Kabupaten Subang Tahun 2023, hal ini dimaksudkan agar penyampaian Laporan Kinerja Kabupaten Subang Tahun 2023 dapat tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sehingga dapat menghasilkan laporan Kinerja yang berkualitas.
- b. Sasaran reviu adalah meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 yang disajikan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 (Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Subang).

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Untuk Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Metode pengumpulan data/informasi
Hal yang dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
Penelaahan penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan. Penelaahan dilakukan dengan melakukan evaluasi LKIP dari setiap Perangkat Daerah dengan menggunakan telaah sederhana (*desk evaluation*) yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaah atas SAKIP (reviu dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dan lainnya);

c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas Kerja Reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Telaah atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

Dalam penyusunan Kertas Kerja Reviu menggunakan formulir *Checklist* Reviu sesuai anak lampiran III/2-2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Terkait Formulir *Checklist* Reviu perlu penambahan penjelasan yang lebih mendalam agar setiap pereviu mempunyai pemahaman/persepsi yang sama.

d. Pelaporan Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa :

- 1) Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan;
- 2) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja;
- 3) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen;
- 4) Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.

Paragraf penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa :

1) Format

a) Laporan Kinerja (LKIP) belum seluruhnya menampilkan data penting IP.

Terdapat penjelasan umum uraian singkat organisasi, rencana dan target yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis untuk setiap sasaran strategis namun belum menyampaikan Inovasi kinerja

Terdapat ketidaksesuaian penjelasan sebagai berikut :

- Kata Pengantar dalam LKIP Kab. Subang tahun 2023 tercatat merupakan laporan ke 4 dari RPJMD seharusnya merupakan laporan tahun ke 5;
- Ikhtisar eksekutif belum menggambarkan capaian kinerja secara rinci;
- Setiap penyajian data table atau grafik belum seluruhnya menyertakan dokumen sumber;
- Gambaran Umum dalam LKIP tidak sesuai dengan dengan RKPD tahun 2023;
- Aspek Strategis belum di informasikan dalam LKIP;
- Isu Stategis dalam LKIP tidak sesuai dengan RKPD Perubahan Bab IV Hal IV-25;
- Permasalahan utama belum di informasikan dalam LKIP.

b) LKj telah menyajikan informasi target kinerja

- Kelengkapan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Tahun 2023 yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja, yaitu :

- RPJMD Tahun 2018-2023

Terdapat ketidaksesuaian Indikator dan Target Kinerja atas persentasi ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan keselamatan, persentasi ketersediaan layak huni dan Persentase peningkatan omset UMKM yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang dengan RPJMD Tahun 2018-2023

(dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1**)

- RKPD Tahun 2022
Terdapat ketidaksesuaian Target Kinerja atas Indikator Harapan Lama Sekolah dan Nilai Investasi PMDN yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang dengan RKPD Tahun 2023
(dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**)
- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
 - Terdapat ketidaksesuaian Indikator Kinerja Sasaran dan Target yang tercantum dalam LKIP dengan Perjanjian Kinerja. (dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**)
 - Terdapat ketidaksesuaian Pagu Anggaran dalam LKIP dengan Perjanjian Kinerja. (dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 4**)
- Terdapat ketidaksesuaian hasil pengukuran atas indikator kinerja utama dalam LKIP
 - Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 dan Tabel 3.7 Capaian Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2021 – Tahun 2023 yaitu :
 - 1) Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 realisasi B (68,32) capaian 81,33% seharusnya realisasi tahun 2023 tercantum masih dalam proses dan capaian dalam proses.
 - 2) Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk realisasi tahun 2023 WTP seharusnya tercantum masih dalam proses.
 - Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2023 yaitu
 - 1) Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 realisasi B (68,32) capaian 81,33% seharusnya realisasi dan capaian tahun 2023 dalam proses;
 - 2) Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) realisasi tahun 2023 WTP capaian 100 seharusnya realisasi dan capaian dalam proses.

- Data capaian kinerja utama (IKU) Pemerintah Kab. Subang Tahun 2023 telah menyajikan hasil perhitungan capaian prosentase.

c) LKIP 2023 telah menyajikan capaian kinerja yang memadai.

LKIP telah menyajikan capaian target sasaran strategis atas indikator kinerja namun belum menyajikan :

- Pembahasan atas tiap indikator baik itu konsep indikator, definisi ataupun manfaat bagi Kabupaten Subang;
- Perbandingan capaian target selama 5 tahun (2018-2023) baik dalam bentuk grafik, bagan atau diagram, serta penjelasan kenaikan/penurunan setiap tahun;
- Analisis dan evaluasi capaian target kinerja pada indikator kinerja.

d) LKIP belum menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.

- SK Penetapan LKIP belum dilampirkan;
- SK Tim Penyusunan LKIP belum dilampirkan;
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 belum dilampirkan;
- Matrik LKIP berdasarkan sasaran strategis Tahun 2023 belum dilampirkan;
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan fungsi, urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum dilampirkan.

e) LKIP telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.

Pada BAB III penjelasan beberapa sasaran strategis atas indikator kinerja, tetapi belum sepenuhnya memberikan penjelasan upaya perbaikan yang telah dilakukan, upaya perbaikan yang dilakukan, dan upaya kedepan yang akan dilakukan.

f) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

LKIP telah menyajikan informasi keuangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, namun belum menyajikan informasi analisis dan evaluasi Kinerja Akuntabilitas Keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

- a) LKIP telah disusun oleh unit kerja yang memadai tugas fungsi untuk itu, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- b) Informasi yang disampaikan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang belum didukung dengan data yang memadai dimana setiap penyajian data baik tabel, grafik serta diagram belum seluruhnya disertai dengan dokumen sumber;
- c) Telah terdapat Mekanisme/ SOP tentang penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKIP. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP4D No 73/49/BP4D/2021 , tanggal 2 Juni 2021 dan Peraturan Bupati Subang Nomor PP.01.02/204/BP4D, tanggal 3 Januari 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang;
- d) Penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja telah ditetapkan;
- e) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKIP belum sepenuhnya diyakini keandalannya.
Analisis/penjelasan akuntabilitas kinerja dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang belum sepenuhnya bersumber dari data kinerja Perangkat Daerah.

3) Substansi

- a) Tujuan/sasaran dalam LKIP belum sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja yaitu pada sasaran "Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan daerah" tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja (Sumber data Perjanjian Kinerja tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Subang);
- b) Tujuan/sasaran dalam LKIP belum selaras dengan Rencana Strategis dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 5** ;
- c) Tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang telah sesuai dengan tujuan/sasaran Indikator Kinerja Utama dalam RKPD dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 6** ;
- d) LKIP telah menyajikan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, namun belum menyajikan data selama 5 tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;

- e) IKU dan IK telah SMART dan cukup
Analisa IKU dan IK yang dengan SMART dan cukup mengukur tujuan/sasaran dengan uraian sebagaimana terlampir pada **Lampiran 7**.

Masih terdapat 7 (tujuh) indikator tidak tercapai setiap tahun yaitu :

- Indeks Reformasi Birokrasi;
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- Persentase ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik;
- Persentase jembatan dalam kondisi baik;
- Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan;
- Harapan Lama Sekolah (HLS);
- Rata - Rata Lama Sekolah.

b. Rekomendasi

Berdasarkan atas simpulan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang selaku Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 untuk memperbaiki hal-hal sebagai berikut :

1) Format

a) Menyajikan Inovasi Kinerja

b) Memperbaiki dan melengkapi hal-hal sebagai berikut :

- Kata Pengantar dalam LKIP Kab. Subang tahun 2023 pada kalimat laporan ke 4 dari RPJMD seharusnya merupakan laporan tahun ke 5 dari RPJMD;
- menggambarkan capaian kinerja secara rinci pada ikhtisar eksekutif;
- Gambaran Umum dalam LKIP agar sesuai dengan dengan RKPD tahun 2023;
- Aspek Strategis agar di informasikan dalam LKIP;
- Menyesuaikan isu strategis dalam LKIP agar sesuai dengan RKPD Perubahan Bab IV Hal IV-25 ;
- Permasalahan utama agar di informasikan dalam LKIP.

c) Penyajian informasi target kinerja

- Merevisi Indikator dan Target Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang sehingga sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023;

- Merevisi Indikator dan Target Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang sehingga sesuai dengan RKPD tahun 2023;
- Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- Merevisi Indikator Kinerja Sasaran dan Target dalam LKIP sesuai dengan Perjanjian Kinerja unit kerja tahun 2023;
- Merevisi jumlah Anggaran dalam LKIP sehingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja unit kerja tahun 2023;
- Mengkoreksi realisasi dan capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2023 pada tabel 3.3, 3.7 disajikan realisasi B (68,32) capaian 81,33% seharusnya "dalam proses";
- Mengkoreksi indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk realisasi tahun 2023 WTP seharusnya tercantum masih dalam proses.

d) Penyajian capaian kinerja yang memadai.

- Menyajikan pembahasan atas tiap indikator baik itu konsep indikator, definisi ataupun manfaat bagi Kabupaten Subang;
- Menyajikan Perbandingan capaian target selama 5 tahun (2018-2023) baik dalam bentuk grafik, bagan atau diagram, serta penjelasan kenaikan/penurunan setiap tahun;
- Menyajikan analisis dan evaluasi capaian target kinerja pada indikator kinerja.

e) Penyajian dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.

Agar Melampirkan :

- SK Penetapan LKIP
- SK Tim Penyusunan LKIP
- Realisasi Anggaran Tahun 2023
- Matrik LKIP berdasarkan sasaran strategis Tahun 2023
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan fungsi, urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

f) Penyajian upaya perbaikan kedepan.

Menyajikan penjelasan upaya perbaikan yang telah dilakukan, upaya perbaikan yang dilakukan, dan upaya kedepan yang akan dilakukan pada BAB III

g) Penyajian akuntabilitas keuangan.

Menyajikan informasi analisis dan evaluasi Kinerja Akuntabilitas Keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

- a) Informasi yang disampaikan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang belum didukung dengan data yang memadai dimana setiap penyajian data baik tabel, grafik serta diagram belum seluruhnya disertai dengan dokumen sumber;
- b) Menyajikan Analisis/penjelasan akuntabilitas kinerja dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang yang bersumber dari data kinerja Perangkat Daerah.

3) Substansi

- a) Agar Menyesuaikan Tujuan/sasaran dalam LKIP dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja yaitu pada sasaran "Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan daerah" (Sumber data Perjanjian Kinerja tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Subang);
- b) Agar Menyesuaikan Tujuan/sasaran dalam LKIP dengan tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis;
- c) Menyajikan perbandingan data kinerja selama 5 tahun terakhir.

7. Tindak lanjut hasil revidi sebelumnya

Untuk tindak lanjut hasil revidi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

Demikian Laporan Hasil Revidi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR, *f*



f **Drs. R. MEMET HIKMAT M.W., CGCAE**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670409 198603 1 003

DAFTAR LAMPIRAN REVIU LAKIP TAHUN 2023

Lampiran 2

Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang dengan RKPD Perubahan Tahun 2023

LKIP			RKPD Perubahan			LKIP PD		
Indikator	Target 2023	Realisasi	Indikator	Target 2023	Realisasi	Indikator	Target 2023	Realisasi
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,05		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,12		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,12	
Nilai Investasi PMDN	3.827.610.000		Nilai Investasi PMDN	3.827.61		Nilai Investasi PMDN	2.200.000.000.000	

Lampiran 3

Kesesuaian Indikator Kinerja Sasaran dan Target dalam LKIP dengan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023	
	LKIP	Perjanjian Kinerja OPD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	B (85,26)
Persentase jembatan dalam kondisi baik	97%	77,7%
Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi baik
	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	-
Persentase ketersediaan rumah layak huni	74,49%	74,65%
Indeks Desa Membangun	0,69	0,7263
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	-
	Rata – rata Lama Sekolah	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,30%	8.84%
Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,01%	2%
Jumlah produksi padi	Jumlah produksi padi	-
Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 3.827.610.000	2.200.000.000.000
Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 10.941.800.000	4.400.000.000.000
	Jumlah kunjungan wisatawan	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
Angka Harapan Hidup	72,50 Tahun	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	48	
Indeks Resiko Bencana	161	

Lampiran 4

Kesesuaian Pagu Anggaran dalam LKIP dengan Perjanjian Kinerja

Program	Anggaran (Rp)		Sesuai/Tidak
	LKIP	PK PD	
Program Pengelolaan Pendidikan	322.927.989.107		Tidak
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.434.731.000,00	1.163.431.000	Tidak
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	46.589.961.250,00	38.691.396.500	Tidak
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	128.354.540.221,00	96.416.194.961	Tidak

Lampiran 5

Kesesuaian Tujuan/sasaran dalam LKIP dengan Rencana Strategis dengan uraian sebagai berikut :

LKIP		RPJMD		Sesuai/ Tidak
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas, pelayanan publik pada masyarakat	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas, pelayanan publik pada masyarakat	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Sesuai
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sesuai
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta berkarakter kebudayaan lokal	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan daerah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta berkarakter kebudayaan lokal	Meningkatnya Pembangunan Insprastruktur jalan Jembatan dan sarana perhubungan yang berkualitas	Tidak
	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman		Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Sesuai
	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa		Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	Sesuai
Terwujudnya kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, religious dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, religious dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan	Sesuai
	Meningkatnya kesempatan kerja		Meningkatnya kesempatan kerja	Sesuai
Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Sesuai
				Sesuai
	Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi		Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Sesuai
	Meningkatnya investasi		Meningkatnya investasi	Sesuai
	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan		Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Sesuai

Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai daerah pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Sesuai
Terwujudnya peningkatan taraf kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terwujudnya peningkatan taraf kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Sesuai
Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sesuai
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Sesuai

Lampiran 6

Kesesuaian Tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam LKIP Pemerintah Kabupaten Subang telah sesuai dengan tujuan/sasaran Indikator Kinerja Utama dalam RKPD

Sasaran Strategis- Indikator LKIP		Sasaran Strategis- Indikator RKPD		Sesuai/ Tidak
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Sesuai
	Nilai Evaluasi AKIP		Nilai Evaluasi AKIP	Sesuai
	Opini BPK		Opini BPK	Sesuai
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai
Meningkatnya pembanguna infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas	Persentase ruas jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Pembangunan Insprastruktur jalan Jembatan dan sarana perhubungan yang berkualitas	Persentase ruas jalan dalam kondisi baik	Sesuai
	Persentase jembatan dalam kondisi baik		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Sesuai
	Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan		Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	Sesuai
Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Sesuai
Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa	Indeks Desa Membangun	Sesuai

Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya derajat pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sesuai
	Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RRLS)	Sesuai
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	Sesuai
Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan		Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Jumlah produksi padi	Sesuai
Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Persentase peningkatan omzet UMKM	Meningkatnya peran industri kreatif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Persentase peningkatan omzet UMKM	Sesuai
Meningkatnya investasi	Nilai Investasi PMDN	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi PMDN	Sesuai
	Nilai Investasi PMA		Nilai Investasi PMA	Sesuai
Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Sesuai
Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan	Sesuai
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Sesuai
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sesuai
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indek Resiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indek Resiko Bencana	Sesuai

Lampiran 7

Analisa Indikator Kinerja Utama dijadikan telah SMART dan kecukupan ukuran tujuan/sasaran

Indikator Kinerja Utama	Spesifik	Measurable/ Terukur	Achievable/ Mampu Dicapai	Relevant/ Kesesuaian	Time Bound/Waktu	Cukup
Indeks Reformasi Birokrasi	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Persentase Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan Yang Berkeselamatan	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Indeks Desa Membangu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Rata - Rata Lama Sekolah (RRLS)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Cukup
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Jumlah Produksi Padi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Persentase Peningkatan Omzet UMKM	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Nilai Investasi PMDN	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Nilai Investasi Penanaman Modal Asing	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Persentase Penduduk Miskin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Angka Harapan Hidup	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup
Indeks Resiko Bencana	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Cukup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Darmodihardjo No.1 Telepon/Faksimile : (0260) 4242927
e-mail : inspektoratdaerah@subang.go.id Subang 41211

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, namun terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Reviu terlampir yang merupakan kesatuan dari pernyataan ini.

Subang, 27 Maret 2024

INSPEKTUR,

Drs. R. MEMET HIKMAT M.W., CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670409 198603 1 003